



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

# Perubahan RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Kotawaringin Barat 2023





BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

19. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 21);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017- 2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018, Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 135);
25. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 9);
26. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 61 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 61);

27. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 76 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rencana program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

## BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dilakukan berdasarkan:

- a. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah maupun keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan dan/atau perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan/atau.
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III: KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI: PENUTUP.

(2) Narasi Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5

Dalam rangka menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi pedoman dalam:

- a. Penyusunan KUA Tahun 2023 serta PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- b. Pembahasan Perubahan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2023.



BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 24 Juli 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,  
  
BUDI SANTOSA



Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 24 Juli 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,  
  
JUNI GULTOM



# KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta atas perkenan-Nya kita dapat menyelesaikan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023.

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023, disusun dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026, RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005-2025 serta mengacu pada Rancangan Teknis RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2027 dan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

Sesuai fungsinya, dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan dokumen rencana untuk perubahan teknis operasional tahunan. Oleh karena itu perannya sangat penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan daerah dalam kurun waktu dari 1 (satu) tahun berjalan dan menjadi pedoman dalam proses Penyusunan KUA dan PPAS serta Penyusunan RAPBD. Untuk itu semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat harus mempedomani serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi/memaduserasikan rencana program hingga pelaksanaannya.

Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.

Pangkalan Bun, 4 Agustus 2023

**Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**



**Dr. Drs. H. BUDI SANTOSA, M.Si**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I Pendahuluan.....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-3
1.3. Sinergi Antar Dokumen.....	I-5
1.4. Maksud dan tujuan.....	I-7
1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.....	I-8
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN .....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Urusan Pendidikan.....	II-2
2.2. Urusan Kebudayaan.....	II-10
2.3. Urusan Kesehatan.....	II-11
2.4. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-30
2.5. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	II-38
2.6. Urusan Pertanahan .....	II-44
2.7. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	II-46
2.8. Urusan Sosial.....	II-56
2.9. Urusan Tenaga Kerja.....	II-59
2.10. Urusan Transmigrasi.....	II-64
2.11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	II-66
2.12. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II-70
2.13. Urusan Pangan.....	II-74
2.14. Urusan Kelautan dan Perikanan.....	II-76
2.15. Urusan Lingkungan Hidup.....	II-82
2.16. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II-89
2.17. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa .....	II-91
2.18. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .....	II-97
2.19. Urusan Perindustrian.....	II-102
2.20. Urusan Perdagangan.....	II-105
2.21. Urusan Perhubungan.....	II-107

2.22. Urusan Penanaman Modal.....	II-117
2.23. Urusan Komunikasi dan Informatika.....	II-121
2.24. Urusan Statistik.....	II-124
2.25. Urusan Persandian.....	II-125
2.26. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.....	II-125
2.27. Urusan Kearsipan.....	II-129
2.28. Urusan Perpustakaan.....	II-131
2.29. Urusan Pariwisata.....	II-134
2.30. Urusan Pertanian.....	II-138
2.31. Unsur Sekretariat Daerah.....	II-146
2.32. Unsur Sekretariat DPRD.....	II-153
2.33. Kewilayahan.....	II-155
2.34. Urusan Pengawasan.....	II-185
2.35. Unsur Perencanaan.....	II-189
2.36. Unsur Keuangan.....	II-196
2.37. Unsur Kepegawaian.....	II-207
2.38. Unsur Pendidikan dan Pelatihan.....	II-211
2.39. Unsur Penelitian dan Pengembangan.....	II-212
2.40. Unsur Pemerintahan Umum.....	II-214

### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2023..... III-1**

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1. Kinerja Perekonomian Daerah.....	III-1
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah.....	III-25
3.1.3. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah.....	III-32
3.2. Arah kebijakan Keuangan Daerah.....	III-36
3.2.1. Kondisi Keuangan Daerah.....	III-37
3.2.2. Arah kebijakan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah.....	III-55

### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....IV-1**

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
4.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023.....	IV-5
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023.....	IV-7
4.2.1. Arah Kebijakan / Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	IV-7
4.2.2. Arah Kebijakan / Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.....	IV-9
4.2.3. Arah Kebijakan / Prioritas Pembangunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.....	IV-10
4.2.4. Tematik Pembangunan Tahun 2023.....	IV-11

4.2.5. Interkoneksi Fokus Pembangunan Nasional dengan Prioritas Daerah RKPD 2023 .....	IV-14
4.2.6. Interkoneksi Fokus Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Prioritas Daerah RKPD 2023.....	IV-17
4.2.7. Interkoneksi Isu Strategis Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Program Intervensi RKPD 2023 .....	IV-20
4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Daerah.....	IV-24
4.4. Penanganan Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.....	IV-33
4.5. Inovasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.....	IV-37
<b>BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....</b>	<b>V-1</b>
5.1. Program dan Kegiatan Pada Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 .....	V-1
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>VI-1</b>

# DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2023 .....	II-2
Tabel 2. 2: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2023 .....	II-10
Tabel 2. 3: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2023 .....	II-12
Tabel 2. 4: Realisasi Pelaksanaan Urusan Kesehatan Pada RSUD Sultan Imanuddin Tahun Anggaran 2023 .....	II-28
Tabel 2. 5: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2023 .....	II-30
Tabel 2. 6: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2023 .....	II-39
Tabel 2. 7: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pertanahan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2023 .....	II-44
Tabel 2. 8: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2023.....	II-46
Tabel 2. 9: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2023 .....	II-49
Tabel 2. 10: Realisasi Pelaksanaan Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2023.....	II-53
Tabel 2. 11: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Dinas Sosial Tahun Anggaran 2023 .....	II-56
Tabel 2. 12: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2023 .....	II-59
Tabel 2. 13: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Transmigrasi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2023 .....	II-65
Tabel 2. 14: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023 .....	II-66
Tabel 2. 15: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023 .....	II-70
Tabel 2. 16: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pangan Tahun Anggaran 2023 .....	II-74
Tabel 2. 17: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023 .....	II-76



Tabel 2. 18: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023 .....	II-83
Tabel 2. 19: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2023.....	II-89
Tabel 2. 20: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2023.....	II-91
Tabel 2. 21: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2023 .....	II-97
Tabel 2. 22: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Perindustrian Tahun Anggaran 2023 .....	II-102
Tabel 2. 23: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Perdagangan Tahun Anggaran 2023 .....	II-105
Tabel 2. 24: Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Urusan Perhubungan Tahun Anggaran 2023 .....	II-108
Tabel 2. 25: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2023 .....	II-117
Tabel 2. 26: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Tahun Anggaran 2023.....	II-121
Tabel 2. 27: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Statistik Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2023 .....	II-124
Tabel 2. 28: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Persandian Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2023 .....	II-125
Tabel 2. 29: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pemuda dan Olahraga Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023.....	II-126
Tabel 2. 30: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Kearsipan Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2023.....	II-129
Tabel 2. 31: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2023.....	II-131
Tabel 2. 32: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pariwisata Tahun Anggaran 2023 .....	II-134
Tabel 2. 33: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2023 .....	II-138
Tabel 2. 34: Realisasi Pelaksanaan Program Unsur Penunjang Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023.....	II-146
Tabel 2. 35: Realisasi Pelaksanaan Program Unsur Penunjang Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2023.....	II-153
Tabel 2. 36: Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Arut Selatan Tahun Anggaran 2023 .....	II-156

Tabel 2. 37: Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Arut Utara	
Tahun Anggaran 2023 .....	II-161
Tabel 2. 38: Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Kumai	
Tahun Anggaran 2023 .....	II-167
Tabel 2. 39: Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Kotawaringin Lama	
Tahun Anggaran 2023 .....	II-172
Tabel 2. 40: Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Pangkalan Banteng	
Tahun Anggaran 2023 .....	II-177
Tabel 2. 41: Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Pangkalan Lada	
Tahun Anggaran 2023 .....	II-182
Tabel 2. 42: Realisasi Inspektorat Kabupaten Tahun Anggaran 2023 .....	II-186
Tabel 2. 43: Realisasi Unsur Perencanaan Tahun Anggaran 2023 .....	II-190
Tabel 2. 44: Realisasi Unsur Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Tahun Anggaran 2023 .....	II-197
Tabel 2. 45: Realisasi Unsur Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah	
Tahun Anggaran 2023 .....	II-203
Tabel 2. 46: Realisasi Unsur Kepegawaian Tahun Anggaran 2023 .....	II-207
Tabel 2. 47: Realisasi Unsur Pendidikan dan Pelatihan	
Tahun Anggaran 2023 .....	II-212
Tabel 2. 48: Realisasi Unsur Penelitian dan Pengembangan	
Tahun Anggaran 2023 .....	II-213
Tabel 2. 49: Realisasi Unsur Pemerintahan Umum	
Tahun Anggaran 2023 .....	II-214
Tabel 3. 1: Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat	
Tahun 2018-2022 .....	III-2
Tabel 3. 2: Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2022 .....	III-5
Tabel 3. 3: Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Berlaku Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2022.....	III-6
Tabel 3. 4: Hasil Perhitungan Analisis LQ (Location Quotient) Terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 - 2022 .....	III-9
Tabel 3. 5: Inflasi Sampit Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2020 - 2022 .....	III-12
Tabel 3. 6: Perkembangan Jumlah Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, dan Bukan Angkatan Kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 – 2022 .....	III-15
Tabel 3. 7: Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 - 2022 .....	III-20



Tabel 3. 8: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 - 2022 .....	III-21
Tabel 3. 9: Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 – 2022.....	III-39
Tabel 3. 10: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 - 2022 .....	III-41
Tabel 3. 11: Kriteria Tingkat Desentralisasi Fiskal.....	III-41
Tabel 3. 12: Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah .....	III-43
Tabel 3. 13: Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 - 2022 .....	III-43
Tabel 3. 14: Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 - 2022.....	III-45
Tabel 3. 15: Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 – 2022.....	III-49
Tabel 3. 16: Proporsi Sumber Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 - 2022 .....	III-50
Tabel 3. 17: Kinerja Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 – 2022 .....	III-52
Tabel 3. 18: Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 - 2022.....	III-54
Tabel 3. 19: Proyeksi Perubahan Pendapatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 .....	III-56
Tabel 3. 20: Proyeksi Perubahan Belanja Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 .....	III-59
Tabel 3. 21: Proyeksi Perubahan Pembiayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 .....	III-59
Tabel 4.1: Strategi dan Arah Kebijakan Pada RPD di Tahun 2023.....	IV-5
Tabel 4. 2: Rumusan Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Barat.....	IV-13
Tabel 4.3: Interkoneksi Arah Kebijakan Nasional dengan Prioritas Daerah Beserta Program Pembangunan Daerah.....	IV-15
Tabel 4. 4: Interkoneksi Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Prioritas Daerah Beserta Program Pembangunan Daerah ...	IV-17
Tabel 4. 5: Interkoneksi Isu Strategis Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Program Intervensi RKPD 2023.....	IV-20
Tabel 4. 6: Target Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	IV-24
Tabel 4. 7: Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2023 .....	IV-25
Tabel 4. 8: Jenis Pelayanan Dasar yang Diampu Oleh Daerah Beserta Indikatornya Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	IV-29

Tabel 4. 9: Penanganan Permasalahan Stunting dan Kemiskinan.....	IV-33
Tabel 4. 10: Rencana Optimalisasi Penggunaan Sisa Dana Bagi Hasil.....	IV-35
Tabel 4. 11: Rencana Pengembangan Pariwisata dan Peningkatan Investasi untuk Pemulihan Ekonomi Daerah .....	IV-35
Table 4. 12: Rencana Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan.....	IV-36
Tabel 4. 13: Rencana Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), Dan Koperasi .....	IV-36
Tabel 5. 1: Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pagu Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023.....	V-2

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1:	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan .....	I-6
Gambar 3. 1:	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat,Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2018 - 2022 .....	III-3
Gambar 3. 2:	Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.....	III-4
Gambar 3. 3:	Sektor Ekonomi yang Memberikan Kontribusi Terbesar dalam Struktur PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 - 2022.....	III-7
Gambar 3. 4:	Hasil Analisis Tipologi Klassen Sektor PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 .....	III-8
Gambar 3. 5:	Perkembangan Inflasi Tahunan Sampit dan Nasional Tahun 2018 - 2022.....	III-12
Gambar 3. 6:	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2018 - 2022 .....	III-14
Gambar 3. 7:	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.....	III-16
Gambar 3. 8:	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2018 - 2022 .....	III-17
Gambar 3. 9:	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 ....	III-18
Gambar 3. 10:	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Dan Nasional Tahun 2028 - 2022 .....	III-19
Gambar 3. 11:	Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Dan Nasional Tahun 2028 - 2022.....	III-21
Gambar 3. 12:	Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2018 - 2022 ...	III-23
Gambar 3. 13:	Gini Rasio Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.....	III-24
Gambar 3. 14:	Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 - 2022.....	III-42
Gambar 4. 1:	Cascading Tujuan I RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 - 2026.....	IV-2

Gambar 4. 2:	Cascading Tujuan II RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026.....	IV-2
Gambar 4. 3:	Cascading Tujuan III RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 - 2026.....	IV-3
Gambar 4. 4:	Cascading Tujuan IV RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 - 2026.....	IV-4
Gambar 4.5:	Cascading Tujuan V RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026.....	IV-4
Gambar 4.6:	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah .....	IV-9
Gambar 4.7:	Rumusan Sinkronisasi Tema Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Barat .....	IV-12

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah dan selaras kebijakan perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional, dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, salah satunya dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, serta atas-bawah dan bawah-atas. RKPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran, yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam perjalanan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka RKPD sebagai salah satu dokumen perencanaan daerah dievaluasi secara periodik dengan memperhatikan kriteria-kriteria tertentu. Apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka dapat dilakukan perubahan RKPD.

Hasil evaluasi RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi prioritas pembangunan, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan, serta penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan. Selain itu, terdapat perubahan peraturan/kebijakan dari pemerintah pusat yang mengamanatkan untuk ditindaklanjuti, yakni :

1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-173/PK/2022 tanggal 29 September 2022 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023.
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

3. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 900/443/BKAD/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Sebagai bentuk tindak lanjut terhadap amanat peraturan/kebijakan dari pemerintah pusat tersebut, telah dilakukan pula penyesuaian APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023, sehingga Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 113 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami beberapa kali perubahan, sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2023 tanggal 14 April 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 113 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.
2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 113 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 26 Tahun 2023 tanggal 3 Juli 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 113 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyesuaian-penyesuaian terkait rencana pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, yang kemudian akan menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2023.

Secara substantif, perumusan rancangan perubahan RKPD meliputi penyesuaian terhadap kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target dan sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/ atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, serta target penyelenggaraan pemerintah daerah. Selanjutnya, dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 ini akan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), dimana substansi lingkup perumusan rancangan perubahan renja perangkat daerah mencakup analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan, dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.



## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 21);

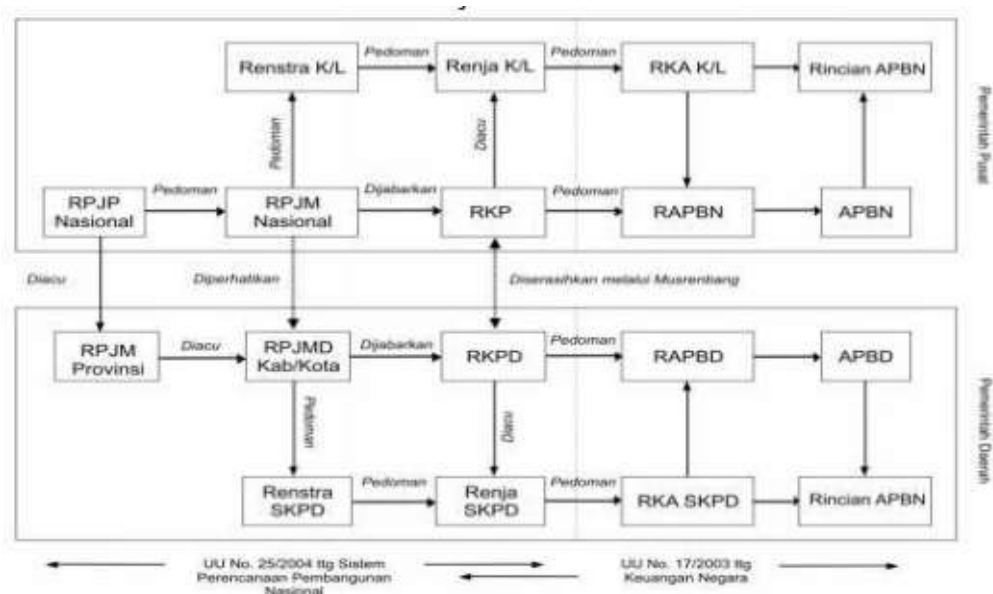


20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017- 2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018, Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 135);
25. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 9);
26. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 61 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 61);
27. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 76 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 76);

### **1.3. Sinergi Antar Dokumen**

RKPD disusun mengacu pada RPJMD Kabupaten/Kota, RKPD Provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD, sebagaimana tahapan penyusunan RKPD dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun gambaran tentang hubungan antara RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Sumber : UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 17 tentang Keuangan Negara

Gambar 1.1  
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, termuat visi dan misi daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, serta tema pembangunan tahun 2021 yakni “Penguatan Kontribusi Sektor Pertanian Terpadu, Industri Pengolahan, Dan Kepariwisata Terhadap Pendapatan Daerah”. Tema pembangunan ini dituangkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 sebagai pedoman prioritas pembangunan daerah tahun 2021. Selanjutnya, RKPD dijabarkan dalam Rencana Kerja setiap perangkat daerah (Renja-PD).

Renja-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dalam hal RKPD mengalami perubahan karena sebab-sebab tertentu, maka terhadap Renja Perangkat Daerah juga wajib dilakukan penyesuaian. Dokumen perubahan renja perangkat daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan.
- b. Evaluasi Renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.
- c. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.
- d. Penutup.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023, yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Perubahan Renja SKPD Tahun 2023, sesuai dengan rencana program prioritas pada dokumen awal RKPD Tahun 2023.
2. Mengacu pada RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026, sebagai acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas Perubahan RKPD 2023.
3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra PD berdasarkan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.
4. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja PD, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

##### **A. Maksud**

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2023.
- b. Sebagai pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023.

##### **B. Tujuan**

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, yang selaras dengan perkembangan kondisi daerah.

## **1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD**

Sistematika Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Sinergi Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN**

### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2023**

- 3.1. Kerangka Perekonomian Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023
- 4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Daerah
- 4.4. Penanganan Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
- 4.5. Inovasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

### **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

- 5.1. Program dan Kegiatan Pada Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

### **BAB VI PENUTUP**

## BAB II

# EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi SKPD, maka urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu :

- A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar**, meliputi: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial.
- B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**, meliputi: Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan dan Kearsipan.
- C. Urusan Pilihan**, meliputi: Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; Transmigrasi.
- D. Unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah** meliputi: Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; serta Penelitian dan Pengembangan;
- E. Unsur Kewilayahan**, meliputi Kecamatan; dan
- F. Unsur Pemerintahan Umum** yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik.

Alokasi belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan berbagai urusan yang tertuang dalam program kegiatan pembangunan tahun anggaran 2023 sebesar Rp.1.519.572.915.000,00 dengan realisasi anggaran pada akhir Triwulan II sebesar Rp.529.584.446.556,68 atau 34,85% dan realisasi fisik sebesar 37,92%. Selengkapnya, berkenaan dengan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada akhir Triwulan II Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :



## 2.1. Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 310.761.973.199,00 dan terealisasi sebesar Rp. 117.702.976.852,00 atau 37,88%. Adapun realisasi anggaran urusan pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2023 (Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG.	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	<b>1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran Persentase ketercukupan pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	39.25	215.498.275.924,00	92,056,098,318.00	42.86	44.92
1	<b>1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dok	10	3	372.244.664,00	112,146,127.00	30.13	51.56
	1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	1	1	13.635.000,00	10,949,000.00	80.30	90.00
	1.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dok	1	0	77.412.564,00	51,172,282.00	66.10	75.00
	1.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	dok	1	0	14.239.950,00	-	-	-
	1.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dok	1	0	15.579.950,00	8,489,100.00	54.49	60.00
	1.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dok	1	1	17.200.000,00	-	-	-
	1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	lap	2	0	9.699.950,00	-	-	-
	1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	lap	2	1	224.477.250,00	41,535,745.00	18.50	50.00
2	<b>1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	lap	4	0	<b>212.596.395.200,00</b>	<b>91.266.295.072</b>	<b>42,93</b>	<b>44,90</b>
	1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	orang	1762	0	212.346.428.000,00	91.095.908.038	42,90	44,86

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG.	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.01.01.2.02.03 Pelak naan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dok	3	1	77.157.200,00	14.788.024	19,17	50,00
	1.01.01.2.02.05 Koordin asi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	lap	1	1	172.810.000,00	155.599.010	90,04	100,00
3	<b>1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Layanan Barang Milik Daerah SKPD</b>	dok	9	0	35.219.550,00	-	-	-
	1.01.01.2.03.02 Pengam anan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dok	6	0	31.999.550,00	-	-	-
	1.01.01.2.03.03 Koordin asi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	lap	1	0	2.520.000,00	-	-	-
	1.01.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	lap	2	0	700.000,00	-	-	-
4	<b>1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan</b>	orang	3	0	242.089.000,00	150.107.606	66,08	75,07
	1.01.01.2.05.02 Pengada an Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengada an Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	paket	0	0	-	-	-	-
	1.01.01.2.05.10 Sosialis asi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	orang	50	0	14.920.000,00	-	-	-
	1.01.01.2.05.11 Bimbing an Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	orang	10	7	227.169.000,00	150.107.606	66,08	80,00
5	<b>1.01.01.2.06 Administr asi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan</b>	pkt	6	0	471.411.032,00	169.993.392	36,06	37,76
	1.01.01.2.06.01 Penyedi aan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	pkt	12	0	40.621.640,00	-	-	-
	1.01.01.2.06.02 Penyedi aan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	pkt	7	0	169.624.574,00	-	-	-
	1.01.01.2.06.03 Penyedi aan Peralatan Rumah Tangga		-	-	0	-	-	-	-

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG.	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	pkt	8	0	12.343.550,00	-	-	-
	1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	pkt	3	0	73.775.268,00	8.220.800	11,14	11,14
	1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lap	20	20	175.046.000,00	161.772.592	92,42	97,00
6	<b>1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang disediakan</b>	<b>unit</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>707.048.545,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,29</b>
	1.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	14	13	89.480.985,00	-	-	37,98
	1.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin	unit	2	2	17.567.560,00	-	-	100,00
	1.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	pkt	3	0	600.000.000,00	-	-	-
7	<b>1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>	<b>bln</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>776.498.109,00</b>	<b>290.295.033</b>	<b>37,39</b>	<b>50,00</b>
	1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	bln	12	6	302.231.064,00	88.862.197	29,40	50,00
	1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	lap	2	0	474.267.045,00	201.432.836	42,47	50,00
8	<b>1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>	<b>unit</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>297.369.824,00</b>	<b>67.261.088</b>	<b>22,62</b>	<b>22,62</b>
	1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	unit	1	0	19.935.400,00	5.671.088	28,45	28,45
	1.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	unit	45	0	134.678.000,00	48.555.000	36,05	36,05
	1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	35	0	77.995.750,00	13.035.000	16,71	16,71



No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG.	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	unit	1	0	64.760.674,00	-	-	-
II	<b>1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PERSENTASE PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	%	100	0	<b>90.842.580.125,00</b>	<b>24.147.430.424,00</b>	<b>26,58</b>	<b>30,54</b>
	<b>1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Satuan Pendidikan</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>55.337.411.840,00</b>	<b>14.226.361.924</b>	<b>25,71</b>	<b>28,28</b>
	1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	ruang	12	0	2.813.000.000,00	-	-	-
	1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	ruang	4	0	987.296.000,00	-	-	-
	1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	ruang	9	0	638.640.000,00	-	-	-
	1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	ruang	2	0	208.209.600,00	-	-	-
	1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	unit	16	0	5.116.351.000,00	-	-	-
	1.01.02.2.01.07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	unit	6	0	1.091.400.000,00	-	-	-
	1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi	ruang	21	0	3.861.293.400,00	-	-	-
	1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	ruang	4	0	471.465.000,00	-	-	-
	1.01.02.2.01.10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0	-	-	-	-
	1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	ruang	1	0	50.800.000,00	-	-	-
	1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	unit	3	0	190.000.000,00	-	-	-
	1.01.02.2.01.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	unit	8	0	1.264.205.000,00	-	-	-
	1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	pkt	50	0	2.192.400.000,00	-	-	-
	1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Siswa	paket	719	0	200.000.000,00	-	-	-
	1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				0	-	-	-	-

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG.	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.01.02.2.01.22 Pengada an Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	pkt	58	0	2.056.900.000,00	-	-	-
	1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan	sat pendidik an	187	0	75.364.440,00	12.476.000	16,55	16,55
	1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar				0	-			
	1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kretaititas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	peserta didik	150	0	75.000.050,00	9.747.900	13,00	13,00
	1.01.02.2.01.26 Penyedi aan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	orang	430	0	2.612.547.350,00	657.788.024	25,18	50,00
	1.01.02.2.01.27 Pengem bangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				0	-	-	-	-
	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan	sat pendidik an	15	0	30.000.000,00	-	-	-
	1.01.02.2.01.29 Pengelo laan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	sat pendidik an	188	94	28.637.700.000,00	13.546.350.000	47,30	50,00
	1.01.02.2.01.31 Peman gunaan Laboratorium Sekolah Dasar	Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah	ruang	14	0	2.764.840.000,00	-	-	-
	<b>1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>sekolah</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>25.520.189.130,00</b>	<b>6.471.097.220</b>	<b>25,36</b>	<b>31,67</b>
	1.01.02.2.02.02 Penamb ahan Ruang Kelas Baru	Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	ruang	2	0	350.000.000,00	-	-	-
	1.01.02.2.02.03 Peman gunaan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	ruang	4	0	1.609.905.000,00	-	-	-
	1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	ruang	7	0	1.490.160.000,00	-	-	-
	1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium	Laboratorium yang Telah Dibangun	ruang	4	0	2.661.000.000,00	-	-	-
	1.01.02.2.02.12 Peman gunaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	ruang	10	0	1.578.079.000,00	-	-	-
	1.01.02.2.02.14 Rehabili tasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi	ruang	2	0	858.497.000,00	8.086.000	2,11	2,11

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG.	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi	ruang	1	0	190.000.000,00	-	-	-
	1.01.02.2.02.16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0	-	-	-	-
	1.01.02.2.02.17 Rehabili tasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	ruang	2	0	272.218.000,00	-	-	-
	1.01.02.2.02.18 Rehabili tasi Sedang/Berat Laboratorium				0	-	-	-	-
	1.01.02.2.02.21 Rehabili tasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah				0	-	-	-	-
	1.01.02.2.02.24 Rehabili tasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0	-	-	-	-
	1.01.02.2.02.25 Pengad aan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	paket	25	0	809.500.000,00	-	-	-
	1.01.02.2.02.28 Pengad aan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	paket	2.500	0	200.000.000,00	-	-	-
	1.01.02.2.02.32 Penyedi aan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama				0		-	-	-
	1.01.02.2.02.35 Pengad aan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	paket	4	0	520.000.000,00	-	-	-
	1.01.02.2.02.36 Penyele ngaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ujian Bagi Peserta Didik	satuan pendidik	65	0	63.750.610,00	13.620.000	21,36	21,36
	1.01.02.2.02.37 Penyiap an dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	satuan pendidik	41	0	38.151.210,00	-	-	-
	1.01.02.2.02.38 Pembina an Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	orang	150	0	77.335.450,00	-	-	-
	1.01.02.2.02.39 Penyedi aan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan	orang	218	0	1.308.000.000,00	326.000.000	<b>24,92</b>	50,00
	1.01.02.2.02.40 Pengem bangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				0	-	-	-	-

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG.	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan	satuan pendidik	63	0	34.692.860,00	-	-	-
	1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidik	73	0	13.458.900.000,00	6.123.391.220	45,50	73,52
	<b>1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>Jumlah Pengelolaan ruang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	satuan pendidik	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>7.746.232.226,00</b>	<b>2.719.582.280</b>	<b>35,11</b>	<b>38,65</b>
	1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	unit	1	0	200.000.000,00	-	-	-
	1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	unit	6	0	731.527.000,00	-	-	-
	1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi	unit	2	0	250.000.000,00	-	-	-
	1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	paket	1	0	35.012.986,00	-	-	-
	1.01.02.2.03.10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD yang Tersedia	paket	186	0	175.000.000,00	-	-	-
	1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	1600	0	86.000.000,00	18.686.780	21,73	50,00
	1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	paket	2	0	90.000.000,00	-	-	-
	1.01.02.2.03.13 Penyeleenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	peserta didik	100	0	69.760.290,00	-	-	-
	1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan	satuan pendidik an	30	0	24.000.000,00	7.795.500	32,48	32,48
	1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				0	-	-	-	-
	1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	satuan pendidik an	35	0	196.531.950,00	-	-	-
	1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	satuan pendidik an	186	0	5.888.400.000,00	2.693.100.000	45,74	50,00
	<b>1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Tersedianya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>			<b>0</b>	<b>2.238.746.929,00</b>	<b>730.389.000,00</b>	<b>33,10</b>	<b>46,63</b>

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG.	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.01.02.2.04.09 Pengadaan perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	paket	1	0	34.797.290,00	-	-	-
	1.01.02.2.04.10 Penyedi aan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	umlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	400	0	110.200.000,00	-	-	-
	1.01.02.2.04.12 Penyele nggaran proses belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	peserta didik	40	0	30.430.783,00	6.588.000	-	21,65
	1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	satuan pendidik an	11	0	20.585.748,00	4.141.000	-	20,12
	1.01.02.2.04.17 Pengelo laan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah	satuan pendidik an	17	0	2.027.580.000,00	719.660.000	35,49	50,00
	1.01.02.2.04.18 Peningkatan kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah	orang	22	0	15.153.108,00	-	-	-
	<b>1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>		dok	2	0	<b>74.434.470,00</b>	25.824.000	34,69	35,20
	<b>1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	dok	1	0	<b>48.233.410,00</b>	-	-	-
	1.01.03.2.01.01 Penyus unan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	dok	2	0	48.233.410,00	-	-	-
	<b>1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b>	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	dok	1	0	<b>26.201.060,00</b>	<b>25.824.000</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
	1.01.03.2.02.01 Penyus unan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	dok	2	0	26.201.060,00	25.824.000	99	100
	<b>1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Persentase Tersedianya Dokumen Tenaga Pendidik dan Pendidik</b>	%	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>4.346.682.680,00</b>	<b>1.473.624.110</b>	<b>33,90</b>	<b>54,40</b>
	<b>1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>dok</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4.346.682.680,00</b>	<b>1.473.624.110</b>	<b>33,90</b>	<b>54,40</b>



No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG.	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	dok	3	0	102.137.440,00	6.350.000	6,22	6,22
	1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	lap	2	0	4.244.545.240,00	1.467.274.110	34,57	55,56
	<b>TOTAL</b>					<b>310.761.973.199,00</b>	<b>117.702.976.852,00</b>	<b>37,45</b>	<b>40,30</b>

Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Pendidikan adalah sebesar 9,81% atau kriteria **Sangat Rendah**.

## 2.2. Urusan Kebudayaan

### Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Kebudayaan diampu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 4.761.933.801,00 dan terealisasi sebesar Rp. 465.385.216,00 atau 11,31%. Adapun realisasi anggaran urusan kebudayaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2023 (Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>								
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	PERSENTASE PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	%	100	0	3,026,690,007.00	342,313,616.00	11.31	12.51
	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat	kegiatan	2	0	1,007,125,007.00	342,313,616.00	33.99	37.59
	2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	terlaksananya pengembangan, pemanfaatan objek pamajuan kebudayaan	kegiatan	2	0	250,000,000	156,562,850	68.07	12.51

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK
							Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.22.02.2.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	terlaksananya pembinaan SDM lembaga, pranata dan kebudayaan	keg	21	0	757,125,007.00	342,313,616.00	45.21	50.00
	<b>2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat</b>	<b>kegiatan</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2,019,565,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	terlaksananya kegiatan perlindungan pengembangan pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	kegiatan	2	0	159,565,000.00	0	0	50.00
	2.22.02.2.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	terlaksananya kegiatan SDM, lembaga dan pranata tradisional	kegiatan	1	0		0	0	-
	2.22.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	terlaksananya pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi	kegiatan	11	0	1,860,000,000.00	0	0	-
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase seni budaya yang lestari	%	0.70	0	450,000,000.00	119,996,600.00	26.67	26.67
	2.22.04.2.01 Pembinaan sejarah lokal dalam (1) satu daerah kabupaten/kota	Persentase seni budaya yang lestari	%	0.70	0	450,000,000.00	119,996,600.00	26.67	26.67
	2.22.04.2.01.01 Pengembangan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal kabupaten/kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	orang	24	6.40	450,000,000.00	119,996,600.00	26.67	26.67
	<b>2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>Persentase cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan</b>	<b>%</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1,285,243,794.00</b>	<b>3,075,000.00</b>	<b>0.24</b>	<b>0.24</b>
	<b>2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya</b>	<b>%</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1,285,243,794.00</b>	<b>3,075,000.00</b>	<b>0.24</b>	<b>0.24</b>
	2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya	terpeliharanya cagar budaya	objek	17	1	1,285,243,794.00	3,075,000.00	0.24	0.24
	<b>TOTAL</b>					<b>4.761.933.801,00</b>	<b>465.385.216,00</b>	<b>11.31</b>	<b>12.51</b>

Rata-rata capaian kinerja program pada urusan Kebudayaan adalah sebesar 0% atau kriteria **Sangat Rendah**.

### 2.3. Urusan Kesehatan

#### Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat dan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.111.783.205.250,00 untuk Dinas Kesehatan dan Rp.204.680.717.000,00 untuk RSUD Sultan Imanudin. Dari alokasi tersebut alokasi pada Dinas Kesehatan terealisasi sebesar Rp. 6.586.820,00 dan RSUD Sultan Imanudin mencatat realisasi sebesar Rp.88.482.956.827,00 atau 43.23% serta realisasi fisik sebesar 50.56%. Adapun realisasi anggaran urusan kesehatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3 Realisasi Program Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2023  
(Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Reali sasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK
						(Rp.)	Rp	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		%	100	0,48	57,261,085,930	17,692,642,208	47,80	47,81
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	dok	7	3	220,605,426	80,922,235	36,68	38,63
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	dok	8	4	166,200,576	69,049,735	41,55	44,13
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dok	1	0	10,865,000	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	dok	1	0	10,865,000	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dok	1	1	7,672,500	7,672,500	100	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dok	1	0	7,672,500	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja skpd	dok	1	1	5,449,850	1,200,000	22,02	22,02
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dok	4	2	11,880,000	3,000,000	25,25	25,25
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	dok	4	2	55,516,030,800	26,620,409,382	47,95	47,95
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	589	589	54,969,212,000	26,376,531,388	47,98	47,98
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dok	3000	1,5	414,793,700	175,414,540	42,29	42,29
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dok	1	100	129,025,000	68,463,454	53,06	53,06
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semest eran yang disusun	lap	13	7	3,000,100	0	0	0
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik</b>	%	100	50	43,304,434	8,023,000	18,53	18,53
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dok	16	8	43,304,434	6,937,000	16,02	16,02
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan peningkatan disiplin aparatur</b>	%	100	50	83,575,000	1,322,000	1,58	1,58



No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK
						(Rp.)	Rp	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	pake	250	0	54,945,000	0	0	0
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai/ kinerja Kepegawaian	dok	4	50	28,630,000	1,322,000	4,62	4,62
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>	%	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>407,881,109</b>	<b>276,673,450</b>	<b>67,83</b>	<b>67,87</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	19	19	10,000,000	9,962,500	99,63	99,63
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	7	4	79,998,608	46,845,500	58,56	58,56
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	21	21	14,931,853	14,680,000	98,31	98,31
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	3	0	5,437,435	0	0	2,76
	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1	79,998,213	57,998,213	72,50	72,50
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lap	18	10	217,515,000	147,187,237	67,67	67,67
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>	%	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>48,469,094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	0	1,100,366	0	0	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	4	0	47,368,728	0	0	0
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>	%	<b>100</b>	<b>0,43</b>	<b>815,256,881</b>	<b>348,851,512</b>	<b>42,79</b>	<b>42,79</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	12	6	559,575,081	232,537,472	41,56	41,56
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	lap	2	2	255,681,800	116,314,040	45,49	45,49
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>	%	<b>100</b>	<b>0,30</b>	<b>125,963,186</b>	<b>34,357,500</b>	<b>27,28</b>	<b>27,28</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	unit	2	2	19,640,500	6,645,500	33,84	33,84
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	113	60	35,000,000	16,685,000	47,67	47,67
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	unit	2	0	46,340,000	0	0	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	unit	1	0	15,000,000	11,027,000	73,51	73,51

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK
						(Rp.)	Rp	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	0	9,982,686	0	0	0
2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi</b>	%	100	0,37	44,198,167,818	15,632,184,612	35,37	36,17
	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya sesuai standar</b>	%	100	0,35	10,525,060,000	217,446,260	2,07	3,26
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	unit	1	0	180,000,000	5,117,100	2,84	2,84
	Pembangunan rumah dinas Tenaga kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	unit	1	0	400,000,000	11,377,500	2,84	2,84
	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	unit	8	0	1,825,000,000	24,897,300	1,36	2,85
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	unit	10	0	1,095,000,000	23,072,460	2,11	8,90
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	unit	2	0	120,000,000	0	0	2,83
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan	unit	12	0	1,435,000,000	23,031,900	1,61	2,83
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan	unit	1	0	100,000,000	0	0	2,83
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	1	0	50,000,000	49,950,000	99,90	99,90
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	unit	22	0	715,000,000	0	0	0
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	paket	208	0	4,425,060,000	0	0	0
	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai	unit	8	0	80,000,000	80,000,000	100	100
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai	unit	171	0	100,000,000	0	0	0

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK
						(Rp.)	Rp	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi</b>	%	100	0,50	33,274,438,244	15,401,310,352	46,29	46,97
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	4.594	2.146	19,990,000	3,000,000	15,01	15,01
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	4.594	2.111	0	0	0	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	4,374	1,961	9,922,000	986,000	9,94	9,94
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	19.122	5.401	41,974,266	2,595,000	6,18	6,18
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai standar	orang	47.885	0	15,000,000	6,298,000	41,99	41,99
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	185.0568	63.746	14,820,000	0	0	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai standar	orang	19.859	10.107	39,991,290	17,423,550	43,57	75,75
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai standar	orang	54.962	15.078	29,997,440	0	0	99,93
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai standar	orang	5.736	3.852	9,980,000	4,940,000	49,50	81,38
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	421	416	34,981,000	4,302,700	12,30	18,85
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga penderita TBC yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai standar	orang	5.030	2.135	14,572,000	8,800,000	60,39	67,92
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	6.113	3.135	79,999,800	23,544,960	29,43	46,75
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dok	12	0	0	0	0	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dok	5	1	193,788,200	18,044,000	9,31	9,31
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga	dok	6	1	59,443,137	5,130,000	8,63	12,54
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dok	20	3	192,421,066	13,651,165	7,09	7,09
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dok	2	0	94,199,155	3,000,000	3,18	0

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK
						(Rp.)	Rp	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	dok	18	0	29,998,369	12,704,000	42,35	54,30
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dok	18	0	191,657,942	13,651,165	7,12	21,51
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang mendapat pelayanan kesehatan	orang	1.125	26.24	20,006,000	0	0	26,24
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	orang	145	135	50,219,000	32,579,000	64,87	66,07
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	orang	60.265	30.100	498,355,200	73,666,000	14,78	37,30
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dok	50.000	10.000	23,697,625,000	12,459,538,900	52,58	52,58
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasiona	Jumlah spesimen penyakit Potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	paket	1	1	9,999,800	8,816,800	88,17	88,17
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kabupaten/Kota Sehat	dok	62	0	20,000,150	0	0	9,86
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	dok	1	0	2,352,477,403	896,771,454	38,12	38,12
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dok	18	0	5,492,598,326	1,779,935,658	32,41	32,41
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	dok	5	0	5,000,000	840,000	16,80	16,80
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	pkm	18	0	25,000,000	0	0	0
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	dok	36	0	14,999,700	5,852,000	39,01	98,49
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	orang	5.030	2.135	15,422,000	0	0	0
	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>0,40</b>	<b>205,441,624</b>	<b>2,084,000</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	dok	20	0	14,967,700	0	0	0
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dok	1	1	14,974,000	2,084,000	13,92	13,92
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet yang di sediakan	unit	18	0	175,499,924	0	0	0
	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>193,227,950</b>	<b>11,344,000</b>	<b>5,87</b>	<b>5,87</b>

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK
						(Rp.)	Rp	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah/Kota yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar	unit	20	0	0	0	0	0
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	pkm	18	0	153,170,000	5,678,000	3,71	3,71
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan ditindaklanjuti Perizinannya	unit	20	0	9,999,950	0	0	0
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	dok	1	1	30,058,000	5,666,000	18,85	18,85
3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai standar</b>	%	75	043	11,415,913,400	4,855,191,546	42,53	43,90
	<b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai standar</b>	%	75	0,30	20,000,000	0	0	23,02
	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	dok	0	0	10,000,000	0	0	0
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	dok	1	0	10,000,000	0	0	46,04
	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pdayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai standar</b>	%	75	0,50	9,966,345,400	4,785,191,546	48,01	48,04
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dok	1	0	10,000,000	0	0	0
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	dok	1	1	9,923,270,400	4,781,443,746	48,18	48,18
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dok	1	1	33,075,000	3,747,800	11,33	18,14
	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai standar</b>	%	0	0,50	1,429,568,000	70,000,000	4,90	15,33
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	kali	0	0	1,429,568,000	70,000,000	4,90	15,33



No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK
						(Rp.)	Rp	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>Persentase sarana kefarmasian yang memenuhi standar</b>	%	35	0,15	458,975,000	9,014,000	1,96	11,93
	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>Persentase sarana kefarmasian yang memenuhi standar</b>	%	35	0	126,619,680	0	0	0
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat	dok	50	25	106,619,680	0	0	0
	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut	sarana	45	0	5,000,000	0	0	0
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat	sarana	9	0	15,000,000	0	0	0
	<b>Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</b>	<b>Persentase sarana kefarmasian yang memenuhi standar</b>	%	35	0	11,000,000	0	0	0
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	dok	1	0	5,000,000	0	0	0
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	%	35	0	6,000,000	0	0	0
	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>Persentase sarana kefarmasian yang memenuhi standar</b>	%	35	0,05	136,344,610	3,333,000	2,44	33,65
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan	dok	1	1	136,344,610	3,333,000	2,44	33,65



No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK
						(Rp.)	Rp	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							
	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	<b>Persentase sarana kefarmasian yang memenuhi standar</b>	%	35	0	10,000,000	0	0	0
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	dok	1	0	10,000,000	0	0	0
	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	<b>Persentase sarana kefarmasian yang memenuhi standar</b>	%	35	0	175,010,710	5,681,000	3,25	5,06
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	unit	0	0	170,025,710	5,681,000	3,34	5,21
	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	dok	0	0	4,985,000	0	0	0
5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase Posyandu Aktif</b>	%	50	0	447,502,200	4,584,000	1,02	2,72
	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Posyandu Aktif</b>	%	50	0	86,450,000	0	0	0
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	dok	50	0	86,450,000	0	0	0
	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Posyandu Aktif</b>	%	50	0	30,000,100	1,086,000	3,62	25,29
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	dok	1	1	30,000,100	1,086,000	3,62	25,29
	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Posyandu Aktif</b>	%	50	0	331,052,100	3,498,000	1,06	1,39

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK
						(Rp.)	Rp	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dok	1	0	331,052,100	3,498,0000	1,06	1,39
	<b>JUMLAH</b>					<b>113,781,644,348</b>	<b>43,078,409,691</b>	<b>37,86</b>	<b>38,31</b>

No	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU DPA- SKPD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK
							Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Laboratorium Kesehatan Daerah</b>				45.05%	982,069,900	442,442,780	45.05%	45.05%
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>47.69%</b>	<b>784,838,800</b>	<b>374,286,456</b>	<b>47.69%</b>	<b>47.69%</b>
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes yang terakreditasi	Persen	100	53.84%	599,810,421	322,914,517	53.84%	53.84%
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes yang terakreditasi	Persen	100	27.76%	185,028,379	51,371,939	27.76%	27.76%
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai standar</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>34.56%</b>	<b>197,231,100</b>	<b>68,156,324</b>	<b>34.56%</b>	<b>34.56%</b>
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	100	34.56%	197,231,100	68,156,324	34.56%	34.56%
	<b>Puskesmas Arut Selatan</b>				25.16%	2,307,882,290	580,710,617	25.16%	25.16%
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>25.94%</b>	<b>2,238,242,290</b>	<b>580,710,617</b>	<b>25.94%</b>	<b>25.94%</b>
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi	Persen	100	0.00%	8,952,000	-	0.00%	0.00%
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi	Persen	100	26.05%	2,229,290,290	580,710,617	26.05%	26.05%
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai standar</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai sdtandar	Persen	100	-	-	-	-	-
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase Posyandu Aktif</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>0.00%</b>	<b>69,640,000</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	0.00%	69,640,000	-	0.00%	0.00%
	<b>Puskesmas Madurejo</b>				26.92%	2,369,809,367	637,931,558	26.92%	26.92%

No	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU DPA-SKPD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>27.18%</b>	<b>2,346,959,367</b>	<b>637,931,558</b>	<b>27.18%</b>	<b>27.18%</b>
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKPKewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi	Persen	100	0.00%	11,092,000	-	0.00%	0.00%
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi	Persen	100	27.31%	2,335,867,367	637,931,558	27.31%	27.31%
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai standar</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>0.00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai sdtandar	Persen	100	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase Posyandu Aktif</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>0.00%</b>	<b>22,850,000</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	0.00%	22,850,000	-	0.00%	0.00%
	<b>Puskesmas Mendawai</b>				<b>25.57%</b>	<b>2,282,037,449</b>	<b>583,495,545</b>	<b>25.57%</b>	<b>25.57%</b>
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>25.75%</b>	<b>2,265,812,449</b>	<b>583,495,545</b>	<b>25.75%</b>	<b>25.75%</b>
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi	Persen	100	0.00%	9,046,000	-	0.00%	0.00%
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi	Persen	100	25.86%	2,256,766,449	583,495,545	25.86%	25.86%
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai standar</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>0.00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai sdtandar	Persen	100	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase Posyandu Aktif</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>0.00%</b>	<b>16,225,000</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	0.00%	16,225,000	-	0.00%	0.00%
	<b>Puskesmas Nantai Palingkau</b>				<b>20.10%</b>	<b>2,208,434,000</b>	<b>443,920,786</b>	<b>20.10%</b>	<b>20.10%</b>
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>20.84%</b>	<b>2,130,584,000</b>	<b>443,920,786</b>	<b>20.84%</b>	<b>20.84%</b>
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi	Persen	100	0.00%	10,843,000	-	0.00%	0.00%
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi	Persen	100	20.94%	2,119,741,000	443,920,786	20.94%	20.94%

No	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU DPA-SKPD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai standar</b>	Persen	100	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai sdtandar	Persen	100	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase Posyandu Aktif</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>0.00%</b>	<b>77,850,000</b>	-	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	<b>0.00%</b>	77,850,000	-	0.00%	<b>0.00%</b>
	<b>Puskesmas Kumpai Batu Atas</b>				<b>12.73%</b>	<b>1,917,549,373</b>	<b>244,037,256</b>	<b>12.73%</b>	<b>12.73%</b>
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>12.90%</b>	<b>1,891,859,373</b>	<b>244,037,256</b>	<b>12.90%</b>	<b>12.90%</b>
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi	Persen	100	<b>0.00%</b>	9,420,000	-	0.00%	<b>0.00%</b>
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi	Persen	100	<b>12.96%</b>	1,882,439,373	<b>244,037,256</b>	<b>12.96%</b>	<b>12.96%</b>
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai standar</b>	Persen	100	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai sdtandar	Persen	100	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase Posyandu Aktif</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>0.00%</b>	<b>25,690,000</b>	-	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	<b>0.00%</b>	25,690,000	-	0.00%	<b>0.00%</b>
	<b>Puskesmas Runtu</b>				<b>15.86%</b>	<b>1,319,893,114</b>	<b>209,341,141</b>	<b>15.86%</b>	<b>15.86%</b>
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>16.21%</b>	<b>1,291,633,114</b>	<b>209,341,141</b>	<b>16.21%</b>	<b>16.21%</b>
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi	Persen	100	<b>0.00%</b>	9,155,919	-	0.00%	<b>0.00%</b>
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi	Persen	100	<b>16.32%</b>	1,282,477,195	209,341,141	<b>16.32%</b>	<b>16.32%</b>
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai standar</b>	Persen	100	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai sdtandar	Persen	100	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase Posyandu Aktif</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>0.00%</b>	<b>28,260,000</b>	-	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>



No	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU DPA-SKPD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	0.00%	28,260,000	-	0.00%	0.00%
	<b>Puskesmas Kumai</b>				21.36%	3,437,940,795	734,282,199	21.36%	21.36%
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>21.43%</b>	<b>3,426,210,795</b>	<b>734,282,199</b>	21.43%	21.43%
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi	Persen	100	0.00%	11,727,000	-	0.00%	0.00%
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi	Persen	100	21.50%	3,414,483,795	734,282,199	21.50%	21.50%
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai standar</b>	Persen	100	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai sdtandar	Persen	100	0,00%	-	-	0.00%	0.00%
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase Posyandu Aktif</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>0.00%</b>	<b>11,730,000</b>	-	0.00%	0.00%
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	0.00%	11,730,000	-	0.00%	0.00%
	<b>Puskesmas Teluk Bogam</b>				3.27%	1,571,562,897	51,405,000	3.27%	3.27%
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>3.37%</b>	<b>1,525,437,897</b>	<b>51,405,000</b>	3.37%	3.37%
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi	Persen	100	0.00%	9,630,000	-	0.00%	0.00%
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi	Persen	100	3.39%	1,515,807,897	51,405,000	3.39%	3.39%
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai standar</b>	Persen	100	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai sdtandar	Persen	100	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase Posyandu Aktif</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>0.00%</b>	<b>46,125,000</b>	-	0.00%	0.00%
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	0.00%	46,125,000	-	0.00%	0.00%
	<b>Puskesmas Sungai Rangit</b>				15.72%	2,420,217,869	380,468,844	15.72%	15.72%
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>16.27%</b>	<b>2,338,977,869</b>	<b>380,468,844</b>	16.27%	16.27%
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi	Persen	100	0.00%	9,420,000	-	0.00%	0.00%

No	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU DPA-SKPD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kabupaten/Kota								
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi	Persen	100	16.33%	2,329,557,869	380,468,844	16.33%	16.33%
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai standar</b>	Persen	100	0.00%	-	-	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai sdtandar	Persen	100	<b>0.00%</b>	-	-	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase Posyandu Aktif</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>0.00%</b>	<b>81,240,000</b>	-	0.00%	<b>0.00%</b>
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	0.00%	81,240,000	-	0.00%	0.00%
	<b>Puskesmas Pangkalan Iada</b>				<b>19.65%</b>	<b>1,594,886,790</b>	<b>313,465,731</b>	<b>19.65%</b>	<b>19.65%</b>
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>19.65%</b>	<b>1,594,886,790</b>	<b>313,465,731</b>	<b>19.65%</b>	<b>19.65%</b>
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi	Persen	100	0.00%	13,063,427	-	0.00%	0.00%
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi	Persen	100	<b>19.82%</b>	1,581,823,363	313,465,731	19.82%	<b>19.82%</b>
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai standar</b>	Persen	100	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai sdtandar	Persen	100	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase Posyandu Aktif</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>0.00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
	<b>Puskesmas Pandu Sanjaya</b>					<b>22.89%</b>	<b>1,665,756,199</b>	<b>381,303,863</b>	<b>22.89%</b>
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>22.98%</b>	<b>1,659,636,199</b>	<b>381,303,863</b>	<b>22.98%</b>	<b>22.98%</b>
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi	Persen	100	0.00%	8,563,000	-	0.00%	0.00%
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi	Persen	100	23.09%	1,651,073,199	381,303,863	23.09%	23.09%
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai standar</b>	Persen	100	0.00%	-	-	0.00%	0.00%



No	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU DPA-SKPD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai sdtandar	Persen	100	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase Posyandu Aktif</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>0.00%</b>	<b>6,120,000</b>	-	0.00%	<b>0.00%</b>
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	0.00%	6,120,000	-	0.00%	0.00%
	<b>Puskesmas Semanggang</b>				<b>22.51%</b>	<b>2,875,977,474</b>	<b>647,374,817</b>	<b>22.51%</b>	<b>22.51%</b>
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>22.80%</b>	<b>2,839,257,474</b>	<b>647,374,817</b>	<b>22.80%</b>	<b>22.80%</b>
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi	Persen	100	0.00%	9,974,000	-	0.00%	0.00%
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi	Persen	100	22.88%	2,829,283,474	647,374,817	22.88%	22.88%
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai standar</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>0.00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai sdtandar	Persen	100	c	-	-	0.00%	0.00%
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase Posyandu Aktif</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>c</b>	<b>36,720,000</b>	-	0.00%	<b>0.00%</b>
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	0.00%	36,720,000	-	0.00%	0.00%
	<b>Puskesmas Karang Mulya</b>				<b>10.87%</b>	<b>1,979,428,755</b>	<b>215,167,055</b>	<b>10.87%</b>	<b>10.87%</b>
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>10.97%</b>	<b>1,961,788,755</b>	<b>215,167,055</b>	<b>10.97%</b>	<b>10.97%</b>
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi	Persen	100	0.00%	9,417,000	-	0.00%	0.00%
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi	Persen	100	11.02%	1,952,371,755	215,167,055	11.02%	11.02%
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai standar</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>0.00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai sdtandar	Persen	100	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase Posyandu Aktif</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>0.00%</b>	<b>17,640,000</b>	-	0.00%	<b>0.00%</b>
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	0.00%	17,640,000	-	0.00%	0.00%

No	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU DPA-SKPD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Puskesmas Arut Utara</b>				14.61%	1,627,645,088	237,829,228	14.61%	14.61%
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	14.84%	1,602,740,088	237,829,228	14.84%	14.84%
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi	Persen	100	0.00%	7,932,000	-	0.00%	0.00%
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi	Persen	100	14.91%	1,594,808,088	237,829,228	14.91%	14.91%
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai standar</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>0.00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai sdtandar	Persen	100	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase Posyandu Aktif</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	0.00%	24,905,000	-	0.00%	0.00%
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	0.00%	24,905,000	-	0.00%	0.00%
	<b>Puskesmas Sambi</b>				2.57%	1,421,544,331	36,491,918	2.57%	2.57%
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	2.57%	1,417,464,331	36,491,918	2.57%	2.57%
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi	Persen	100	0.00%	9,420,000	-	0.00%	0.00%
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi	Persen	100	2.59%	1,408,044,331	36,491,918	2.59%	2.59%
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai standar</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>0.00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai sdtandar	Persen	100	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase Posyandu Aktif</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	0.00%	4,080,000	-	0.00%	0.00%
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	0.00%	4,080,000	-	0.00%	0.00%
	<b>Puskesmas Kotawaringin Lama</b>				9.51%	1,972,392,961	187,600,194	9.51%	9.51%
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	9.51%	1,972,392,961	187,600,194	9.51%	9.51%
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi	Persen	100	0.00%	9,657,000	-	0.00%	0.00%
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi	Persen	100	9.56%	1,962,735,961	187,600,194	9.56%	9.56%

No	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU DPA-SKPD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai standar</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>0.00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai sdtandar	Persen	100	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase Posyandu Aktif</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>0.00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
	<b>Puskesmas Riam Durian</b>				<b>11.79%</b>	<b>1,444,726,559</b>	<b>170,288,106</b>	<b>11.79%</b>	<b>11.79%</b>
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>11.89%</b>	<b>1,432,321,559</b>	<b>170,288,106</b>	<b>11.89%</b>	<b>11.89%</b>
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi	Persen	100	0.00%	9,253,000	-	0.00%	0.00%
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi	Persen	100	11.97%	1,423,068,559	170,288,106	11.97%	11.97%
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai standar</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>0.00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai sdtandar	Persen	100	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase Posyandu Aktif</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>0.00%</b>	<b>12,405,000</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	0.00%	12,405,000	-	0.00%	0.00%
	<b>Puskesmas Ipuh Bangun Jaya</b>				<b>0.00%</b>	<b>1,237,147,489</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>0.00%</b>	<b>1,227,647,489</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi	Persen	100	0.00%	8,434,654	-	0.00%	0.00%
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi	Persen	100	0.00%	1,219,212,835	-	0.00%	0.00%
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai standar</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai sdtandar	Persen	100	-	-	-	-	-

No	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU DPA-SKPD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase Posyandu Aktif</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>0.00%</b>	<b>9,500,000</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	0.00%	9,500,000	-	0.00%	0.00%
	Instalasi Farmasi					4,883,606,952	89,264,172	1.83%	4.46
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>4,734,830,552</b>	<b>56,210,900</b>	<b>1.19%</b>	<b>3.9</b>
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi	Persen	100	50	4,135,202,000	53,960,900	1.30%	3.79
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi	Persen	100	50	599,628,552	2,250,000	0.38%	4.66
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai standar</b>	<b>Persen</b>	<b>75</b>	<b>50</b>	<b>148,776,400</b>	<b>33,053,272</b>	<b>22.22%</b>	<b>22.22</b>
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	75	50	148,776,400	33,053,272	22.22%	22.22
	<b>Jumlah</b>					<b>41,520,509,652</b>	<b>6,586,820,810</b>	<b>15.86%</b>	

Rata-rata capaian kinerja program pada Dinas Kesehatan adalah sebesar 1,94 % atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.

**Tabel 2.4 Realisasi Pelaksanaan Urusan Kesehatan pada RSUD Sultan Imanuddin Tahun Anggaran 2023 (Akhir Triwulan II)**

KODE	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU DPA-SKPD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase ketercukupan administrasi perkantoran Persentase ketercukupan pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>44.10</b>	<b>184,880,138,520</b>	<b>83,890,956,827</b>	<b>45.38</b>	<b>47.00</b>
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah</b>	<b>Lap</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>29,082,774,969</b>	<b>14,352,763,606</b>	<b>49.35</b>	<b>49.50</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	387	194	28,992,828,969	14,304,978,662	49.34	49.34

KODE	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU DPA-SKPD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	6	6	89,946,000	47,784,944	53.13	100.00
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</b>	Unit	4	4	<b>797,363,551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Unit	4	4	797,363,551	0	0	100.00
	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</b>	Bulan	12	4	<b>155,000,000,000</b>	<b>69,538,193,221</b>	<b>44.86</b>	<b>46.26</b>
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah operasional pelayanan rumah sakit	Bulan	12	6	155,000,000,000	69,538,193,221	44.86	46.26
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat</b>	%	100	21.10	<b>19,800,578,480</b>	<b>4,592,000,000</b>	<b>23.19</b>	<b>83.80</b>
	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun</b>	Unit	2	1	<b>17,939,993,567</b>	<b>4,000,000,000</b>	<b>22.30</b>	<b>89.19</b>
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah pembangunan RS beserta sarana dan prasarannya	Unit	2	0	299,995,500	0	0	0
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit	1	0	149,998,067	0	0	0
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	unit	2	1	17,490,000,000	4,000,000,000	22.87	91.48
	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah perawatan dan pengobatan bagi pasien tidak mampu</b>	Dok	1	0	<b>1,860,584,913</b>	<b>592,000,000</b>	<b>31.82</b>	<b>31.82</b>
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dok	1	1	1,860,584,913	592,000,000	31.82	31.82
	<b>Jumlah</b>					<b>204,680,717,000</b>	<b>88,482,956,827</b>	<b>43.23</b>	<b>50.56</b>

Sampai dengan akhir triwulan II tahun 2023, Rata-rata capaian kinerja program pada RSUD Sultan Imanuddin adalah sebesar 32,60% atau masuk **Sangat Rendah**.



## 2.4. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

### Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terbagi dalam 3 (tiga) Bidang yaitu Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi serta 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yaitu UPTD Alat Berat dan UPTD Laboratorium Konstruksi dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 199.920.811.000,00. Dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp. 36.727.173.680,00 atau 18,37%. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Pekerjaan Umum berikut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.5 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2023 (Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran Persentase ketercukupan pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	35	11.791.323.241	5.551.312.434	47,08	48,49
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dok	8	1	72.636.200	36.973.180	50,90	51,45
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	2	1	56.637.100	36.973.180	65,28	65,98
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dok	1	0	4.571.350	-	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	dok	1	0	4.571.350	-	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dok	1	0	1.714.100	-	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dok	1	0	1.714.100	-	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	lap	1	0	1.714.100	-	0,00	0,00



No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	lap	1	0	1.714.100	-	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>dok</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>8.837.074.150</b>	<b>4.642.475.311</b>	<b>52,53</b>	<b>53,36</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	67	35	8.094.284.000	4.295.464.441	53,07	53,07
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dok	12	6	651.784.700	279.689.200	42,91	54,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	lap	1	1	88.780.000	67.321.670	75,83	76,36
	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	dok	1	0	1.685.450	-	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/	lap	2	0	540.000	-	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Layanan Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>dok</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>227.950.147</b>	<b>20.730.000</b>	<b>9,09</b>	<b>9,18</b>
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	dok	1	0	1.685.450	-	0,00	0,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dok	1	0	226.264.697	20.730.000	9,16	9,25
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan</b>	<b>paket</b>	<b>2</b>		<b>309.020.000</b>	<b>81.173.492</b>	<b>26,27</b>	<b>26,73</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	orang	1	0	40.200.000	-	0,00	0,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	13	5	268.820.000	81.173.492	30,20	30,72
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan</b>	<b>paket</b>	<b>9</b>		<b>1.049.405.886</b>	<b>262.666.746</b>	<b>25,03</b>	<b>24,60</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	0	17.110.761	-	0,00	0,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan	paket	3	0	197.238.809	6.624.969	3,36	3,36

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	4	0	55.549.743	-	0,00	0,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	0	105.226.231	15.311.340	14,55	8,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lap	10	10	170.426.000	153.676.412	90,17	90,93
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	91	0	180.422.674	-	0,00	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	15	0	147.074.868	-	0,00	0,00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	1	176.356.800	87.054.025	49,36	50,00
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>	lap	12	6	<b>894.696.800</b>	<b>293.707.080</b>	<b>32,83</b>	<b>43,53</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	lap	12	6	298.696.200	103.106.760	34,52	34,67
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	lap	12	6	596.000.600	190.600.320	31,98	47,97
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>	unit	4	1	<b>400.540.058</b>	<b>213.586.625</b>	<b>53,32</b>	<b>53,52</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	unit	1	0	40.718.800	8.585.875	21,09	21,25
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	18	0	123.282.300	17.000.750	13,79	13,79
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	60	60	184.468.958	183.800.000	99,64	100,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	unit	1	0	52.070.000	4.200.000	8,07	8,16
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase ketercukupan administrasi perkantoran</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>23</b>	<b>640.691.100</b>	<b>211.734.300</b>	<b>33,05</b>	<b>37,35</b>

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	1		117.812.500	73.187.500	62,12	74,01
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	14	4	117.812.500	73.187.500	62,12	74,01
9	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran	Unit	1	0	522.878.600	138.546.800	26,50	29,10
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	2	0	522.878.600	138.546.800	26,50	29,10
III	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran	%	100		1.676.123.500	1.163.749.240	69,43	73,10
10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	1	1	749.999.916	740.370.000	98,72	100,00
	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	1	1	749.999.916	740.370.000	98,72	100,00
11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	1		926.123.584	423.379.240	45,72	51,32
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	16	8	926.123.584	423.379.240	45,72	51,32
IV	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	Persentase panjang drainase utama, sungai dan pantai yang ditangani	%	39,80		20.239.353.000	3.951.489.799	19,52	11,98
12	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	umlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	unit	6	0	4.237.123.000	424.520.050	10,02	9,11
	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	unit	1	0	947.697.000	62.988.300	6,65	7,86
	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	km	0,05	0	350.000.000	9.618.150	2,75	2,80
	Pembangunan Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun	km	0,02	0	700.000.000	156.950.200	22,42	2,80
	Peningkatan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan	km	0,03	0	150.000.000	4.073.700	2,72	6,50

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	km	1,9	0	1.003.546.000	97.311.200	9,70	11,85
	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	km	10,7	0	1.085.880.000	93.578.500	8,62	14,13
13	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air</b>	%	<b>39,80</b>	0	<b>16.002.230.000</b>	<b>3.526.969.749</b>	<b>22,04</b>	<b>12,74</b>
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	km	0,46	0	12.730.561.000	3.120.354.650	24,51	12,98
	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	km	4	0	534.569.000	91.035.100	17,03	20,63
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	km	0,02	0	198.500.000	5.161.500	2,60	2,61
	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	km	31,76	0	496.500.000	68.460.699	13,79	2,65
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	km	40	0	1.025.600.000	214.785.000	20,94	22,38
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	km	14,26	0	1.016.500.000	27.172.800	2,67	2,70
V	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang layak</b>	%	<b>96,60</b>	0	<b>1.204.000.000</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat</b>	SR	<b>264</b>	0	<b>1.204.000.000</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan	SR	264	0	1.204.000.000	-	0,00	0,00
VI	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>Persentase penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah untuk pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS</b>	%	<b>13</b>	0	<b>625.164.000</b>	<b>186.712.833</b>	<b>29,87</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R yang dibangun/ditingkatkan</b>	dok	<b>2</b>	0	<b>625.164.000</b>	<b>186.712.833</b>	<b>29,87</b>	<b>0,00</b>

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	dok	2	0	625.164.000	186.712.833	29,87	0,00
VII	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai</b>	%	2		<b>762.000.000</b>	<b>89.080.900</b>	<b>11,69</b>	<b>9,33</b>
16	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah prasarana air limbah yang dibangun</b>	<b>rumah tangga</b>		0	<b>762.000.000</b>	<b>89.080.900</b>	<b>11,69</b>	<b>9,33</b>
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	rumah tangga	42	0	556.000.000	-	0,00	0,00
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	rumah tangga	12	0	206.000.000	89.080.900	43,24	34,51
VIII	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>Persentase luas genangan tertangani sistem jaringan drainase skala kota tidak terjadi genangan (&gt;30 cm selama 2 jam, &gt; 2 kali setahun)</b>	%	90	0	<b>3.513.570.000</b>	<b>301.114.600</b>	<b>8,57</b>	<b>11,54</b>
17	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Panjang drainase dibangun dan direhabilitasi</b>	<b>M</b>	<b>3490</b>	<b>0</b>	<b>3.513.570.000</b>	<b>301.114.600</b>	<b>8,57</b>	<b>11,54</b>
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	M	1745	0	3.413.570.000	301.114.600	8,82	11,74
	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi	M	109	0	100.000.000	-	0,00	4,65
IX	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase Infrastruktur terbangun pada sistem jaringan</b>	%	26,05	0	<b>19.426.051.000</b>	<b>2.185.092.180</b>	<b>11,25</b>	<b>6,33</b>
18	<b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah sistem jaringan jalan lingkungan permukiman dibangun dan dipelihara</b>	<b>sistem jaringan</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>19.426.051.000</b>	<b>2.185.092.180</b>	<b>11,25</b>	<b>6,33</b>



No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	sistem jaringan	111	0	18.458.898.000	2.120.210.430	11,49	5,91
	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	sistem jaringan	3	0	967.153.000	64.881.750	6,71	14,28
X	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Persentase persetujuan bangunan gedung (PBG) yang laik fungsi</b>	%	<b>2,54</b>	<b>0</b>	<b>15.773.596.000</b>	<b>443.128.493</b>	<b>2,81</b>	<b>1,05</b>
19	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>Jumlah PBG yang diterbitkan</b>	unit	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15.773.596.000</b>	<b>443.128.493</b>	<b>2,81</b>	<b>1,05</b>
	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Panjang Jalan yang Dibangun	unit	1	0	15.773.596.000	443.128.493	2,81	1,05
XI	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Persentase kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik</b>	%	<b>34,78</b>	<b>0</b>	<b>118.830.479.437</b>	<b>21.634.033.150</b>	<b>18,21</b>	<b>13,20</b>
20	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik</b>	%	<b>34,78</b>	<b>0</b>	<b>118.830.479.437</b>	<b>21.634.033.150</b>	<b>18,21</b>	<b>13,20</b>
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan		km		0	200.000.000	-	0,00	50,00
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	km	0,4118	0	7.498.666.437	556.981.483	7,43	4,10
	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	km	9,2906	0	101.872.054.020	19.098.735.437	18,75	13,48
	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	km	4,7647	0	5.205.757.980	1.531.257.154	29,41	26,25
	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	km	21,5789	0	3.054.001.000	414.944.778	13,59	4,75
	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	km	304,7803	0	1.000.000.000	32.114.298	3,21	3,26



No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XII	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Rasio tenaga operator/teknisi/analisis di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	%	<b>85,94</b>	<b>0</b>	<b>1.244.082.872</b>	<b>295.150.912</b>	<b>23,72</b>	<b>5,53</b>
21	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>Rasio tenaga operator/teknisi/analisis di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	%	<b>85,94</b>	<b>0</b>	<b>547.246.841</b>	<b>128.516.681</b>	<b>23,48</b>	<b>8,56</b>
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	orang	125	0	250.639.100	46.819.607	18,68	18,69
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	orang	125	0	228.040.914	47.854.149	20,98	0,00
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan	orang	130	0	68.566.827	33.842.925	49,36	0,00
22	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rasio tenaga operator/teknisi/analisis di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	%	<b>85,94</b>	<b>0</b>	<b>487.375.150</b>	<b>93.019.140</b>	<b>19,09</b>	<b>0,00</b>
	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	lap	1	0	276.098.150	93.019.140	33,69	0,00
	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	dok	2	0	198.476.000	-	0,00	0,00
	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	orang	2	0	12.801.000	-	0,00	0,00
23	<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	<b>Rasio tenaga operator/teknisi/analisis di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	%	<b>85,94</b>	<b>0</b>	<b>209.460.881</b>	<b>73.615.091</b>	<b>35,15</b>	<b>10,48</b>
	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	orang	60	0	191.595.881	73.615.091	38,42	11,46
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	lap	1	0	17.865.000	-	0,00	0,00

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XIII	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Persentase Pelayanan Permohonan Pemanfaatan Ruang</b>	%	17,6	0	4.194.376.850	714.574.839	17,04	37,57
24	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	dok	5	0	2.978.713.450	612.417.039	20,56	39,77
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	dok	1	0	930.481.450	171.608.578	18,44	38,67
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	dok	1	0	309.150.000	63.910.827	20,67	20,89
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	dok	3	0	1.739.082.000	376.897.634	21,67	43,71
25	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen pendukung pemanfaatan ruang</b>	<b>dok</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>821.748.000</b>	<b>54.687.800</b>	<b>6,66</b>	<b>16,60</b>
	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	dok	3	0	821.748.000	54.687.800	6,66	16,60
26	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen pendukung pengendalian pemanfaatan ruang</b>	<b>dok</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>393.915.400</b>	<b>47.470.000</b>	<b>12,05</b>	<b>64,72</b>
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	dok	3	0	393.915.400	47.470.000	12,05	64,72
	<b>JUMLAH</b>					<b>199.920.811.000</b>	<b>36.727.173.680</b>	<b>18,37</b>	<b>14,41</b>

Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Pekerjaan Umum adalah sebesar 4,46% atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.

## 2.5. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

### Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.302.940.150,00 dan realisasi pada akhir Triwulan II sebesar Rp. 2.441.716.626,00 atau 18,35 %. Adapun realisasi anggaran urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.6 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2023 (Akhir Triwulan II)**

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>					<b>13.302.940.150</b>	<b>2.441.716.626</b>	<b>18,35</b>	<b>21,09</b>
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	%	98,5	-	4.049.678.256	2.038.526.776	50,34	54,48
	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	%	98,5		64.406.000	19.816.285	30,77	85,32
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	3	2	50.574.000	19.816.285	39,18	98,88
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dok	1	0	3.310.000	-	-	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	dok	1	0	1.882.000	-	-	-
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dok	1	1	2.700.000	-	-	100,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dok	1	0	3.225.000	-	-	-
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	lap	12	6	940.000	-	-	50,00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	lap	3	3	1.775.000	-	-	100,00
	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	dok	6	3	3.158.081.772	1.808.764.428	57,27	58,32
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	12	6	2.952.727.772	1.704.416.784	57,72	58,29

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dok	12	6	160.799.000	68.147.644	42,38	50,63
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	lap	1	1	43.505.000	36.200.000	83,21	90,05
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Lapo Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	lap	4	0	1.050.000	-	-	-
	<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Jumlah Layanan Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>dok</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>84.095.528</b>	<b>9.495.108</b>	<b>11,29</b>	<b>11,30</b>
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Lapo Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	dok	1	0	84.095.528	9.495.108	11,29	11,30
	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan</b>	<b>paket</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>41.448.000</b>	<b>16.701.050</b>	<b>40,29</b>	<b>41,21</b>
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	orang	1	1	7.700.000	7.350.000	95,45	100,00
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	6	0	33.748.000	9.351.050	27,71	27,79
	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan</b>	<b>paket</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>170.312.345</b>	<b>104.283.684</b>	<b>61,23</b>	<b>58,60</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	14.931.654	9.950.920	66,64	66,69
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan	paket	1	0	59.735.586	27.516.749	46,06	46,13
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	1	12.305.295	7.638.238	62,07	50,75
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	0	12.791.810	6.395.560	50,00	25,10

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lap	26	19	70.548.000	52.782.217	74,82	74,89
	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai dengan kebutuhan</b>	<b>unit</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>247.140.272</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33,14</b>
5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	15	15	49.717.522	-	-	100,00
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	10	10	27.421.150	-	-	100,00
9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1		170.001.600	-	-	2,80
	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai dengan kebutuhan</b>	<b>lap</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>176.774.602</b>	<b>66.637.787</b>	<b>37,70</b>	<b>50,00</b>
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	lap	12	6	70.438.152	19.283.691	27,38	50,00
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	lap	12	6	106.336.450	47.354.096	44,53	50,00
	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>	<b>unit</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>107.419.737</b>	<b>12.828.434</b>	<b>11,94</b>	<b>11,98</b>
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	5	0	20.189.737	5.452.434	27,01	27,12
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	35	0	22.130.000	7.376.000	33,33	33,40
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	0	65.100.000	-	-	-



NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	Persentase Rumah Layak Huni bagi Korban bencana atau relokasi program	%	100	0	182.221.132	2.730.822	1,50	5,12
	<b>PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/ KOTA</b>	Jumlah pemenuhan dokumen hasil Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	dok	100	0	45.751.050	-	-	11,75
1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	dok	1	0	45.751.050	-	-	11,75
II	<b>SOSIALISASI DAN PERSIAPAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/ KOTA</b>	Sosialisasi dan persiapan penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program terlaksana	orang	100	0	25.440.950	-	-	4,76
2	Sosialisasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	orang	100	0	25.440.950	-	-	4,76
	<b>PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/ KOTA</b>				0	98.029.282	2.730.822	2,79	2,80
5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota			0	98.029.282	2.730.822	2,79	2,80
	<b>PENERBITAN SERTIFIKAT KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG ( SKGB )</b>	Jumlah penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB) yang ditindaklanjuti	lap	5	0	12.999.850	-	-	-
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	lap	5	0	12.999.850	-	-	-
III	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Persentase Kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang dtangani	%	1,37	0	4.294.695.990	123.830.330	2,88	2,78

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA</b>	Jumlah pemenuhan dokumen database penataan kawasan permukiman kumuh	dok	2	0	221.052.050	13.945.000	6,31	7,20
2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	dok	6	0	177.757.000	-	-	-
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	lap	1	0	43.295.050	13.945.000	32,21	36,77
	<b>PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA</b>	Jumlah Realisasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	lap	2	0	4.073.643.940	109.885.330	2,70	2,54
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	lap	2	0	23.999.800	7.739.800	32,25	-
6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang diremajakan/dipugar	ha	0,22	0	3.699.644.140	102.145.530	2,76	2,80
8	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni				0	350.000.000	-	-	-
IV	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>Persentase kawasan permukiman yang tertangani</b>	%	23,6	0	1.513.371.000	41.801.238	2,76	3,06
	<b>PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Jumlah RTLH yang di rehabilitasi/ditingkatka n untuk mencegah tumbuh kembang permukiman kumuh	unit	132	0	1.513.371.000	41.801.238	2,76	3,06
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	unit	132	0	1.513.371.000	41.801.238	2,76	3,06

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang di lengkapi PSU	%	97	0	3.262.973.772	234.827.460	7,20	13,00
	URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN				0	3.262.973.772	234.827.460	7,20	13,00
1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	dok	1	0	339.626.273	13.029.200	3,84	4,28
2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas	lokasi	25	0	2.906.701.899	221.798.260	7,63	14,09
3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	lap	10	0	16.645.600	-	-	-

Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebesar 0% atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.

## 2.6. Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.458.707.850,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.53.957.119,00 atau 11,76%. Adapun realisasi anggaran urusan Pertanahan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.7 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2023 (Akhir Triwulan II)**

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			target	Realisasi	Satuan		REALISASI KEUANGAN	%	REAL FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				0	458.707.850	53.957.119	11,76	12,19
VI	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Prersentase Jumlah rekomendasi siteplan yang terbit	%	100	0	55.099.850	8.014.000	14,54	14,64

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			target	Realisasi	Satuan		REALISASI KEUANGAN	%	REAL FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>PEMBERIAN IZIN LOKASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Jumlah pengajuan ijin penerbitan siteplan yang tertangani	%	100	0	55.099.850	8.014.000	14,54	14,64
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah rekomendasi siteplan yang di terbitkan	dok	30	0	55.099.850	8.014.000	14,54	14,64
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	Persentase jumlah sengketa yang ditangani	%	100	0	58.263.400	5.692.000	9,77	13,62
	<b>PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	jumlah sengketa yang ditangani	Berita acara	5	0	58.263.400	5.692.000	9,77	13,62
2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	umlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita acara	5	0	58.263.400	5.692.000	9,77	13,62
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	Persentase sengketa ganti rugi tanah yang diselesaikan	%	100	0	135.453.800	22.979.000	16,96	18,05
	<b>PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Jumlah penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk program pembangunan	dok	2	0	135.453.800	22.979.000	16,96	18,05
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	dok	2	0	135.453.800	22.979.000	16,96	18,05
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	Persentase bidang tanah pemda yang didaftarkan sertifikasi	%	42,02	0	209.890.800	17.272.119	8,23	7,36
	<b>PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Jumlah pemenuhan dokumen penggunaan tanah yang tersusun	dok	10	0	209.890.800	17.272.119	8,23	7,36

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			target	Realisasi	Satuan		REALISASI KEUANGAN	%	REAL FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	dok	10	0	209.890.800	17.272.119	8,23	7,36
<b>TOTAL</b>						<b>458.707.850</b>	<b>53.957.119</b>	<b>11,76</b>	<b>12,19</b>

Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Pertanahan adalah sebesar 0% atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.

## 2.7. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

### Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Alokasi anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp. 8.399.567.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.516.819.562,000 atau 53,77%. Alokasi anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah alokasi anggaran sebesar Rp. 32.409.871.000,00 dengan realisasi keuangan pada akhir Triwulan II sebesar Rp. 10.205.695.999,00 atau 31,49%. Alokasi anggaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.644.689.000,00 dengan realisasi keuangan pada akhir Triwulan II sebesar Rp. 1.440.022.963,00 atau 31,00%. Adapun realisasi anggaran urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.8 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2023 (Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	%	100	43	6,551,714,800	3,926,448,668	59.93	71.02
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	dok	4		5,119,719,499	3,499,140,031	68.35	78.82



No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	orang	50	50	5,068,861,799	3,458,699,493	68.23	68.23
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dok	250	126	4,325,200	2,035,000	47.05	47.05
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	lap	1	1	46,102,000	37,975,038	82.37	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	lap	45	45	430,500	430,500	100.00	100.00
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	orang	10	0	241,792,000	12,968,807	5.36	10.33
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	10	0	241,792,000	12,968,807	5.36	10.33
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	1	0	41,688,000	275,000	0.66	0.66
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dok	1	0	41,688,000	275,000	0.66	0.66
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	umlah dokumen administrasi umum yang disediakan	paket	4	0	379,706,686	158,961,108	41.86	43.52
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	0	6,249,633	1,492,850	23.89	30.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	3	1	102,330,693	42,830,550	41.86	50.87
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	1	39,405,360	16,249,150	41.24	51.67
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lap	6	3	231,721,000	98,388,558	42.46	47.89
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	2	0	181,371,488	35,592,150	19.62	40.00
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	24	0	52,924,973	0.00	0.00	0.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	10	3	128,446,515	35,592,150	27.71	40.00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	lap	3	2	245,546,527	82,032,322	33.41	58.38

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lap	5	0	1,750,000	0	0.00	0.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	lap	12	6	74,020,000	18,268,284	24.68	60.88
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	lap	12	6	169,776,527	63,764,038	37.56	55.87
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	2	2	341,890,600	137,754,250	40.29	52.39
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	unit	12	6	311,030,600	125,304,250	40.29	54.78
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	43	21	30,860,000	12,450,000	40.34	50.00
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum				1,847,852,200	590,095,894	31.93	42.50
8	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti				1,760,551,200	576,895,894	32.77	40.00
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan	kasus	120	0	134,652,000	0.00	0.00	0.00
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	dok	12	6	1,538,606,000	570,935,894	37.11	55.65
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	dok	4	0	21,858,200	0.00	0.00	0.00
9	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan	orang	50	0	42,840,000	0.00	0.00	0.00

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	dok	4	0	22,595,000	0	0.00	0.00
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelanggaran Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	lap	3	2	87,301,000	13,200,000	15.12	45.00
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Perda		0	13,255,000.00	0.00	0.00	0.00
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	lap	12	6	33,366,000	13,200,000	39.56	60.00
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	lap	12	3	40,680,000	0.00	0.00	30.00
	<b>TOTAL</b>					<b>4.644.689.000</b>	<b>1.440.022.963</b>	<b>31,00</b>	<b>75,29</b>

Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebesar 39,55 % atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.

**Tabel 2.9 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2023 (Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	%	100	43	6.551.714.800	3.926.448.668	59,93	71,02
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	dok	4		5.119.719.499	3.499.140.031	68,35	78,82
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	orang	50	50	5.068.861.799	3.458.699.493	68,23	68,23

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dok	250	126	4.325.200	2.035.000	47,05	47,05
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	lap	1	1	46.102.000	37.975.038	82,37	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	lap	45	45	430.500	430.500	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	<b>orang</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>241.792.000</b>	<b>12.968.807</b>	<b>5,36</b>	<b>10,33</b>
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	10	0	241.792.000	12.968.807	5,36	10,33
<b>3</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>dok</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>41.688.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dok	1	0	41.688.000	275.000	0,66	0,66
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	umlah dokumen administrasi umum yang disediakan	paket	4	0	<b>379.706.686</b>	<b>158.961.108</b>	<b>41,86</b>	<b>43,52</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	0	6.249.633	1.492.850	23,89	30,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	3	1	102.330.693	42.830.550	41,86	50,87
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	1	39.405.360	16.249.150	41,24	51,67
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lap	6	3	231.721.000	98.388.558	42,46	47,89
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>unit</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>181.371.488</b>	<b>35.592.150</b>	<b>19,62</b>	<b>40,00</b>
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	24	0	52.924.973	0,00	0,00	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	10	3	128.446.515	35.592.150	27,71	40,00

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	lap	3	2	245.546.527	82.032.322	33,41	58,38
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lap	5	0	1.750.000	0	0,00	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	lap	12	6	74.020.000	18.268.284	24,68	60,88
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	lap	12	6	169.776.527	63.764.038	37,56	55,87
6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	2	2	341.890.600	137.754.250	40,29	52,39
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	unit	12	6	311.030.600	125.304.250	40,29	54,78
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	43	21	30.860.000	12.450.000	40,34	50,00
II	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum				1.847.852.200	590.095.894	31,93	42,50
7	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti				1.760.551.200	576.895.894	32,77	40,00
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan	kasus	120	0	134.652.000	0,00	0,00	0,00
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	dok	12	6	1.538.606.000	570.935.894	37,11	55,65
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	dok	4	0	21.858.200	0,00	0,00	0,00
	Peningkatan Kapasitas	Jumlah SDM Satuan	orang	50	0	42.840.000	0,00	0,00	0,00



No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan							
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	dok	4	0	22.595.000	0	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	lap	3	2	87.301.000	13.200.000	15,12	45,00
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Perda		0	13.255.000,00	0,00	0,00	0,00
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	lap	12	6	33.366.000	13.200.000	39,56	60,00
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	lap	12	3	40.680.000	0,00	0,00	30,00
<b>TOTAL</b>						<b>8.399.567.000</b>	<b>4.516.819.562</b>	<b>53,77</b>	<b>56,76</b>

Rata-rata capaian kinerja program pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Dinas Satpol PP adalah sebesar 36,56% atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.

**Tabel 2.10 Realisasi Pelaksanaan Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Tahun Anggaran 2023 (Sampai Dengan Triwulan II)**

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
		Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		Fisik
						Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>48.49916505</b>	<b>4,652,228,440</b>	<b>2,551,701,233</b>	<b>54.85</b>	<b>59.62</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dok	13	7	56,362,500	41,354,621	73.37	95.21
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	3	1	52,823,000	40,517,121	76.70	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dok	1	0	740,000	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dok	1	0	1,390,000	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dok	1	1	615,000	615,000	100.00	100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dok	1	0	572,000	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	lap	1	3	222,500	222,500	100.00	100
Predikat Kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	lap	3	3	-	-	-	-
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>dokum en</b>	<b>718</b>	47	<b>3,831,666,702</b>	-	-	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	umlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	1344	336	3,769,171,402	2,201,631,645	58.41	61.54
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokum en	700	42	806,300	744,000	92.27	93.02
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	2	1	61,112,500	50,061,128	81.92	99.12

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
		Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		Fisik
						Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	18	4	576,500	-	-	-
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang disediakan	orang	4	2	31,362,000	-	-	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	4	2	31,362,000	-	-	-
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang disediakan	paket	8	4	93,603,820	2,252,436,773	58.78	62.14
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	3,735,761	-	-	50.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	23,830,845	11,692,131	49.06	49.06
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	1	8,134,104	3,919,650	48.19	50.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	3	0	5,745,310	-	-	50.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	1	52,157,800	26,627,397	51.05	50.00
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	laporan	8	4	374,501,318	-	-	61.54
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	2	85,135,868	30,829,795	36.21	50.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	2	289,365,450	131,070,754	45.30	50.00
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	unit	12	3	264,732,100	-	-	61.54
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	7	1	39,521,000	8,535,212	21.60	100

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
		Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		Fisik
						Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	43	10	210,751,100	39,999,900	18.98	27.78
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	21	3	14,460,000	5,235,000	36.20	50.00
<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Prosentase Jumlah Penduduk yang Mendapat Layanan Kebencanaan Sesuai SPM Sub Urusan Bencana</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>6165</b>	<b>27,757,642,560</b>	<b>7,653,994,766</b>	<b>27.57</b>	<b>27.28</b>
<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penduduk yang Mendapat Layanan Informasi Rawan Bencana</b>	<b>dok</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>701,741,000</b>	<b>197,702,981</b>	<b>28.17</b>	<b>32.96</b>
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	dok	1	0	541,150,000	152,539,031	28.19	28.25
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi,	orang	200	0	160,591,000	45,163,950	28.12	48.82
<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana</b>	<b>dok</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>26,169,796,880</b>	<b>7,078,938,545</b>	<b>27.05</b>	<b>26.17</b>
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan	orang	600	0	30,472,980	-	-	20.13
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana	dok	12	0	191,677,612	11,848,583	6.18	24.61
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian	dok	1	0	25,947,646,288	7,067,089,962	27.24	26.19
<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Penanganan Darurat Bencana</b>	<b>dok</b>	<b>100</b>	<b>3105</b>	<b>848,808,200</b>	<b>377,353,240</b>	<b>44.46</b>	<b>56.79</b>
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	dok	9	1	19,126,000	-	-	5.54
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	orang	100	3105	558,064,000	242,626,700	43.48	53.81
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	orang	100	372	60,181,500	91,590,840	152.19	98.49
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	laporan	12	6	211,436,700	43,135,700	20.40	57.40

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
		Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		Fisik
						Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang Disusun	dok	1	0	37,296,480	-	-	26.75
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	dok	1	0	37,296,480	-	-	-
<b>Jumlah</b>					<b>32,409,871,000</b>	<b>10,205,695,999</b>	<b>31.49</b>	<b>31.92</b>

Rata-rata capaian kinerja program pada urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada BPBD adalah sebesar 3.107% atau masuk kriteria **Sangat Tinggi**.

## 2.8. Urusan Sosial

### Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 6.762.812.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.732.209.432,00 atau 40,40%. Adapun realisasi program urusan Sosial selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.11 Realisasi Pelaksanaan Urusan Sosial Tahun Anggaran 2023  
(Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			DANA DPASKPD (Rp.)	REALISASI APBD		
		Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK
						Rp	(%)	(%)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>				<b>6.762.812.000,00</b>	<b>2.732.209.432,00</b>	<b>40,40</b>	<b>40,93</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	%	<b>100</b>		<b>5.078.141.940</b>	<b>2.556.617.104,00</b>	<b>50,35</b>	<b>50,81</b>
	<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	dok	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>62.194.000</b>	<b>40.326.421,00</b>	<b>64,84</b>	<b>93,14</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Sosial)	dok	3	1	45.549.000	40.326.421,00	88,53	81,67
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dinas Sosial)	dok	1		1.243.750	0	0,00	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dok	1		1.243.750	0	0,00	0
	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	dok	1		1.812.500	0	0,00	0
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD	dok	1		1.812.500	0	0,00	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dok	1		10.162.500	0	0,00	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	lap	1		370.000	0	0,00	0
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	lap			<b>4.370.574.324,00</b>	<b>2.147.542.969,00</b>	<b>49,14</b>	<b>74,39</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Sosial)	orang	12	6	4.321.066.324,00	2.107.183.490,00	48,77	48,77
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok	1	1	48.968.000	40.359.479	82,42	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Dok	1		540.000	0,00		



No	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			DANA DPASKPD (Rp.)	REALISASI APBD		
		Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
						Rp	(%)	
	SKPD							
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>paket</b>			<b>133.660.756</b>	<b>85.284.180,00</b>	<b>63,81</b>	<b>82,31</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Sosial)	paket	8	8	8.437.300	8.437.300,00	100,00	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Sosial)	paket	1	1	26.965.350	26.796.450,00	99,37	100,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Sosial)	paket	1	1	23.688.006	11.611.090,00	49,02	76,29
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	paket	2	1	34.260.100	19.999.350,00	58,38	58,38
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Sosial)	lap	4	3	40.310.000	18.439.990,00	45,75	76,90
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>paket</b>			<b>89.752.200</b>	<b>88.333.800,00</b>	<b>98,42</b>	<b>100,00</b>
	Pengadaan Mebel (Dinas Sosial)	paket	3	3	16.891.890	15.984.000,00	94,63	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Sosial)	paket	3	3	72.860.310	72.349.800,00	99,30	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>lap</b>			<b>310.011.660</b>	<b>121.474.334,00</b>	<b>39,18</b>	<b>39,18</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Sosial)	lap	12	6	114.033.400	35.849.696,00	31,44	37,84
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Sosial)	lap	12	6	195.978.260	85.624.638,00	43,69	43,69
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>unit</b>			<b>111.949.000</b>	<b>73.655.400,00</b>	<b>65,79</b>	<b>0,00</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Sosial)	unit	24	8	76.395.000	58.955.400	77,17	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Sosial)	unit	3		16.104.000	0	0,00	0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jenis	3		19.450.000	14.700.000,00	<b>75,58</b>	50,00
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>%</b>			<b>719.299.670</b>	<b>73.112.400</b>	<b>10,16</b>	<b>14</b>
	<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>dok</b>			<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dinas Sosial)	dok	10	5	500.000		0,00	10,80
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>orang</b>			<b>718.799.670</b>	<b>73.112.400,00</b>	<b>10,17</b>	<b>14,31</b>
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	orang	14	14	34.720.000	8.680.000	25,00	50
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	orang	6	6	38.280.000	15.750.000	41,14	49
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	keluarga	12		345.000.000	0	0,00	0
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	lembaga	15	5	290.800.000	48.682.400	16,74	23
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) (Dinas Sosial)	sertifikat	1	0	9.999.670	0	0,00	0
	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>%</b>			<b>97.194.260</b>	<b>38.746.008,00</b>	<b>39,86</b>	<b>138,57</b>
	<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	<b>orang</b>	<b>70</b>	<b>97</b>	<b>97.194.260</b>	<b>38.746.008,00</b>	<b>39,86</b>	<b>138,57</b>
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota	orang	70	97	97.194.260	38.746.008,00	39,86	138,57

No	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			DANA DPASKPD (Rp.)	REALISASI APBD		
		Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
						Rp	(%)	
	untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal (Dinas Sosial)							
	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	%			<b>109.696.910</b>	<b>13.939.600,00</b>	<b>12,71</b>	<b>17,06</b>
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	orang			<b>63.239.710</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Penyediaan Permakanan	orang	30		8.066.200	0	0,00	0
	Penyediaan Sadang	orang	30		10.774.960	0	0,00	0
	Penyediaan Alat Bantu	orang	3		9.542.650	0	0,00	0
	Pemberian Pelaaan Reunifikasi Keluarga	orang	5		2.165.000	0	0,00	0
	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial (Dinas Sosial)	orang	1		2.175.900	0	0,00	0
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat (Dinas Sosial)	orang	10		850.000	0	0,00	0
	Fasilitasi Pemnbuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	orang	5		1.550.000	0	0,00	0
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	orang	5		2.250.000	0	0,00	0
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	orang	20		5.000.000	0	0,00	0
	Pemberian Layanan Keaduratan	orang	5		4.200.000	0	0,00	0
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	5		2.250.000	0	0,00	0
	Pemberian Layanan Rujukan	orang	2	1	14.415.000	0	0,00	0
	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	orang			<b>46.457.200</b>	<b>13.939.600,00</b>	<b>30,01</b>	<b>45,19</b>
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	orang	10		30.849.200	13.939.600,00	45,19	45,19
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	orang	1		15.608.000		0,00	28,14
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	%			<b>228.141.490</b>	<b>39.300.850,00</b>	<b>17,23</b>	<b>20,51</b>
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	orang			<b>228.141.490</b>	<b>39.300.850,00</b>	<b>17,23</b>	<b>20,51</b>
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	orang	52860	8032	45.519.600	16.522.850	36,30	36,30
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	keluar	52860	6383	16.625.000	6.138.000	36,92	59
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	keluarga	1000	3997	165.996.890	16.640.000	10,02	12,32
	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	%			<b>392.837.730</b>	<b>2.993.470,00</b>	<b>0,76</b>	<b>0,79</b>
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	orang			<b>362.395.350</b>	<b>1.872.270</b>	<b>0,52</b>	<b>0</b>
	Penyediaan Makanan	orang	350		115.727.500	1.450.020,00	1,25	1,25
	Penyediaan Sadang	orang	100		216.387.020	422.250,00	0,20	0,20
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	unit	1		19.076.580	0	0,00	0
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	orang	10		10.131.450	0	0,00	0
	Pelayanan Dukungan Psikososial	orang	15		1.072.800	0	0,00	0
	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	orang			<b>30.442.380</b>	<b>1.121.200,00</b>	<b>3,68</b>	<b>3,68</b>
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	orang	30		30.442.380	1.121.200	3,68	3,68
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	%			<b>137.500.000</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>5,45</b>	<b>6,55</b>
	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	lap	1		<b>137.500.000</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>5,45</b>	<b>6,55</b>
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	lap	12	5	137.500.000	7.500.000,00	5,45	6,55
	<b>Jumlah</b>				<b>6.762.812.000</b>	<b>2.732.209.432</b>	<b>40,40</b>	<b>50,81</b>

Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Sosial adalah sebesar 0% atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.

## URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

### 2.9. Urusan Tenaga Kerja

#### Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan total alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 6.454.720.340,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.889.033.966,00 atau 44,76 %. Adapun realisasi anggaran urusan tenaga kerja selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.12 Realisasi Pelaksanaan Urusan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2023  
(Akhir Triwulan II)**

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>					<b>6,454,720,340</b>	<b>2,889,033,966</b>	<b>44.76</b>	<b>53.00</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>41.25</b>	<b>5,402,446,264</b>	<b>2,759,614,146</b>	<b>44.76</b>	<b>55.00</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>dok</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>103,935,650</b>	<b>58,944,091</b>	<b>41.71</b>	<b>38.00</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	2	2	63,308,550	44,566,761	51.12	82.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	dok	1	0	1,980,000	0	0.00	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil	dok	1	0	1,980,000	0	0.00	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	dok	1	0	1,100,000	0	0.00	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA Perubahan -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	dok	1	0	1,100,000	0	0.00	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	lap	3	1	34,467,100	14,377,330	41.71	35.00
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>lap</b>	<b>3</b>		<b>4,338,638,330</b>	<b>2,218,001,045</b>	<b>51.12</b>	<b>56.00</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	33	16	4,291,199,030	2,175,865,813	50.71	55.00

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	lap	1	1	46,439,000	42,135,232	90.73	95.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	lap	17	0	1,000,300	0	0.00	0.00
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Kepegawaian yang Disediakan	paket	3		<b>106,128,600</b>	<b>79,320,949</b>	<b>74.74</b>	<b>80.00</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	1	1	18,600,000	18,600,000	100.00	0.00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	40	0	11,312,600	0	0.00	0.00
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	6	4	76,216,000	60,720,949	79.67	83.00
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	5	1	<b>188,259,707</b>	<b>89,036,612</b>	<b>47.29</b>	<b>48.00</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	0	4,124,250	0	0.00	0.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	30,268,649	22,863,225	75.53	80.00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	0	8,891,592	3,986,520	44.83	48.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	5	0	23,692,896	4,449,900	18.78	20.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lap	24	0	121,282,320	57,736,967	47.61	45.00
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang Disediakan	unit	2	2	<b>69,387,443</b>	<b>53,650,000</b>	<b>77.32</b>	<b>80.00</b>
	Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	10	10	7,249,965	7,150,000	98.62	100
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	9	7	62,137,478	46,500,000	74.83	80.00

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	lap	3	2	<b>376,830,900</b>	<b>223,546,549</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lap	5	3	7,490,000	2,500,000	33.38	38.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	lap	12	6	115,019,900	51,831,564	45.06	40.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	lap	12	6	254,321,000	169,214,985	66.54	55.00
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	unit	3		<b>219,265,634</b>	<b>37,114,900</b>	<b>16.93</b>	<b>33.00</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	9	5	58,919,850	27,554,900	46.77	50.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	25	0	19,642,010	9,560,000	48.67	22.00
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	0	140,703,774	0	0.00	0.00
	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	%	100	0	<b>50,426,670</b>	<b>2,825,400</b>	<b>5.60</b>	<b>6.00</b>
	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja	dok	2	0	<b>50,426,670</b>	<b>2,825,400</b>	<b>0.06</b>	<b>6.00</b>
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	dok	1	0	35,323,850	0	0.00	0.00
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	dok	1	0	15,102,820	2,825,400	18.71	20.00
	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Persentase Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	%	73	0	<b>491,785,056</b>	<b>16,534,838</b>	<b>3.36</b>	<b>4.20</b>
	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	Jumlah Lulusan Pelatihan yang Bekerja	orang	32	0	<b>284,266,356</b>	<b>16,534,838</b>	<b>0.06</b>	<b>6.00</b>
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	orang	32	0	249,846,583	16,534,838	6.62	7.00



NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	kegiatan	1	0	34,419,773	0	0.00	0.00
3	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	lembaga	5	0	25,073,000	0	0.00	0.00
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	lembaga	5	0	25,073,000	0	0.00	0.00
	<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>	Jumlah Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	perizinan	5	0	57,557,200	8,359,592	0.00	10.00
	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Integrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	perizinan	5	0	57,557,200	8,359,592	14.52	10.00
	<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	perusahaan	2	0	47,020,000	0	0.00	0.00
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	perusahaan	2	0	47,020,000	0	0.00	0.00
	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Pengukuran Produktivitas	dok	2	0	77,868,500	0	0.00	0.00
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	dok	2	0	77,868,500	0	0.00	0.00
	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	%	10	0	360,058,080	76,322,992	21.20	26.00
4	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	orang	152	0	276,083,130	26,496,280	9.60	15.00
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	orang	1	0	14,998,180	0	0.00	0.00
	Pelayanan antar kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	orang	100	0	63,099,950	23,202,280	36.77	55.00
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	orang	30	0	4,975,000	0	0.00	0.00
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang program Perluasan Kesempatan Kerja	orang	1	0	13,010,000	3,294,000	25.32	27.00

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
	Perluasan Kesempatan Kerja <b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui	orang	20	0	180,000,000	0	0.00	0.00
		Jumlah Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	lembaga	4	0	5,257,000	1,098,000	0.00 0.00	0.00
	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	lembaga	4	0	5,257,000	1,098,000	20.89	0.00
	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja	orang	60	0	78,717,950	48,728,712	0.00	65.00
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	orang	50	0	38,369,670	21,175,632	55.19	58.00
	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	orang	10	0	40,348,280	27,553,080	68.29	70.00
	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Persentase Terelesainya Perselisihan Hubungan Industrial	%	100	0	150,004,270	36,561,990	0.00	21.00
	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Pengesahan peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama terhadap perusahaan binaan	perusahaan	61	0	79,666,070	17,371,310	21.81	22.00
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan	perusahaan	60	0	8,381,550	2,196,000	26.20	28.00
	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	perusahaan	1	0	1,521,850	0	0.00	0.00
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	lap	2	0	69,762,670	17,371,310	24.90	22.00
	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Perusahaan yang Dibina	perkara	8	0	70,338,200	19,190,680	27.28	29.00
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	perkara	4	0	48,436,800	16,994,680	35.09	38.00

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	perkara	4	0	17,335,850	2,196,000	12.67	14.00
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	asosiasi & serikat pekerja	39	0	1,521,850	0	0.00	0.00
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	orang	105226	0	3,043,700	0	0.00	0.00
	<b>BALAI LATIHAN KERJA</b>					<b>163.154.390</b>	<b>70.143.129</b>	<b>42,99</b>	<b>45,00</b>
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	%	100		163.154.390	70.143.129	0,00	45,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan	paket	1		7.979.790	7.359.231	92,22	95,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1		7.979.790	7.359.231	92,22	95,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	lap	2		155.174.600	62.783.898	0,00	43,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	lap	12		26.200.800	8.154.598	31,12	35,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	lap	12		128.973.800	54.629.300	42,36	50,00
						<b>6,454,720,340</b>	<b>2,889,033,966</b>	<b>44.76</b>	<b>53.00</b>

Rata-rata capaian kinerja program pada urusan Tenaga Kerja adalah sebesar 13,71% atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.

## 2.10. Urusan Transmigrasi

### Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan transmigrasi diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 417.670.270,00. dan terealisasi sebesar Rp. 15.896.680,00 atau 3,81%. Adapun realisasi anggaran urusan transmigrasi selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.13 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2023 (Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan				PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>					<b>417.670.270</b>	<b>15.896.680</b>	<b>3,81</b>	<b>3,50</b>
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	Persentase Kawasan Transmigrasi yang direncanakan	%	<b>100</b>		<b>34.850.650</b>	<b>1.098.000</b>	<b>5,49</b>	<b>3,50</b>
<b>18</b>	<b>Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi</b>	Jumlah Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	<b>dok</b>	<b>4</b>		<b>34.850.650</b>	<b>1.098.000</b>	<b>5,49</b>	<b>3,50</b>
	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	dok	2		8.999.000	0	0,00	0,00
	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	kawasan trans	1		5.851.800	0	0,00	0,00
	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	dok	3		19.999.850	1.098.000	5,49	7,00
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	Persentase Pembangunan Fasilitas Kawasan Transmigrasi	%	<b>100</b>		<b>361.057.400</b>	<b>14.798.680</b>	<b>0,00</b>	<b>4,25</b>
<b>19</b>	<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	<b>lap</b>	<b>1</b>		<b>361.057.400</b>	<b>14.798.680</b>	<b>0,00</b>	<b>4,25</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	lap	1		328.645.400	14.798.680	4,50	5,00
	Pemindahan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	kepala keluarga	500		32.412.000	0	0,00	0,00
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	Persentase Pengembangan Kawasan Eks Transmigrasi	%	<b>50</b>		<b>21.762.220</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian</b>	Jumlah Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	<b>satuan pemukiman</b>	<b>1</b>		<b>21.762.220</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	satuan pemukiman	1		21.762.220	0	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>					<b>417.670.270</b>	<b>15.896.680</b>	<b>3,81</b>	<b>3,50</b>

Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Transmigrasi adalah sebesar 0% atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.

## 2.11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 6.822.416.469,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.194.416.575,00 atau 0,47%. Adapun realisasi selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.14 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023 (Akhir Triwulan II)**

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			Pagu APBD (Rp)	Realisasi APBD		
		Satuan	Target	Realisasi TW II		Realisasi Keuangan		Real Fisik (%)
						RP	(%)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>5,876,605,779</b>	<b>3,046,050,997</b>	<b>51.83</b>	<b>51.83</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>%</b>	<b>98</b>	<b>48.4</b>	<b>84,495,450</b>	<b>16,003,201</b>	<b>18.94</b>	<b>18.94</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dok	3	1	46,190,000	1,000,000	2.16	2.16
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	Dok	1	-	996,250	-	0.00	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	Dok	1	1	996,250	-	0.00	0.00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA yang disusun	Dok	1	-	1,169,750	1,169,750	100.00	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Dok	1	-	996,250	-	0.00	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	Dok	3	3	32,697,200	13,833,451	42.31	42.31
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	Dok	12	6	1,449,750	-	0.00	0.00
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>			<b>-</b>	<b>4,541,628,276</b>	<b>2,667,310,828</b>	<b>58.73</b>	<b>58.73</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	36	36	4,481,049,326	2,614,894,571	58.35	58.35
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	14	7	992,750	-	0.00	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Dok	1	-	58,584,200	52,416,257	89.47	89.47



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			Pagu APBD (Rp)	Realisasi APBD		
		Satuan	Target	Realisasi TW II		Realisasi Keuangan		Real Fisik (%)
						RP	(%)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Semester	Dok	2	1	1,002,000	-	0.00	0.00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>	%	<b>100</b>	46	<b>120,492,000</b>	<b>56,191,791</b>	<b>46.64</b>	<b>46.64</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Stel	35	35	13,150,000	13,150,000	100.00	100
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	2	2	29,422,000	16,000,000	54.38	54.38
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah SDM yang Mengikuti Bimbingan Teknis		8	4	77,920,000	27,041,791	34.70	34.70
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>	%	<b>100</b>	48.33	<b>277,461,769</b>	<b>95,715,173</b>	<b>34.50</b>	<b>34.50</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis Komponen Instalasi listrik/Penerangan yang disediakan	Jenis	7	4	8,399,615	4,990,000	59.41	59.41
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1	67,301,932	40,313,140	59.90	59.90
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	-	10,219,781	-	-	0.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan Jenis Barang Cetak yang Disediakan	Paket	2	1	37,854,441	3,639,550	9.61	9.61
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aktifitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang disediakan	Laporan	22	4	153,686,000	46,772,483	30.43	30.43
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>	%	<b>100</b>	51.15	<b>370,801,064</b>	<b>44,534,532</b>	12.01	12.01
Pengadaan Mebel	Jenis Meubeler yang disediakan	Jenis	3	3	64,699,334	44,534,532	68.83	68.83
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan	Unit	3	-	108,101,730	-	0.00	0.00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	Unit	1	-	198,000,000	-	0.00	0.00
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>	%	<b>100</b>	49.94	<b>361,118,760</b>	<b>151,153,272</b>	<b>41.86</b>	<b>41.86</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	-	420,000	-	0.00	0.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	6	84,510,000	26,796,903	31.71	31.71
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	6	276,188,760	124,356,369	45.03	45.03

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			Pagu APBD (Rp)	Realisasi APBD		
		Satuan	Target	Realisasi TW II		Realisasi Keuangan		Real Fisik (%)
						RP	(%)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>	%	98	50	<b>120,608,460</b>	<b>15,142,200</b>	<b>12.55</b>	<b>12.55</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	25,343,464	7,730,000	30.50	30.50
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	16	10	80,234,996	7,412,200	9.24	9.24
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	1	15,030,000	-	0.00	0.00
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>				-	<b>182,697,100</b>	<b>25,631,608</b>	<b>14.03</b>	<b>14.03</b>
<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase SKPD yang menerapkan ARG</b>	%	<b>100</b>	-	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>	0.00	0.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	50,000,000		0.00	0.00
<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Rasio KDRT</b>	%	<b>0.00025</b>	-	<b>132,697,100</b>	<b>25,631,608</b>	19.32	19.32
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	-	132,697,100	25,631,608	19.32	19.32
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)</b>	%	<b>31.5</b>	-	<b>148,156,390</b>	<b>22,468,320</b>	15.17	<b>15.2</b>
<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengaduan Kekerasan yang terlayani</b>	%	<b>100</b>	100	<b>148,156,390</b>	<b>22,468,320</b>	15.17	15.2
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	12	8	148,156,390	22,468,320	15.17	15.2

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			Pagu APBD (Rp)	Realisasi APBD		
		Satuan	Target	Realisasi TW II		Realisasi Keuangan		Real Fisik (%)
						RP	(%)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK</b>	Prosentase Sekolah Ramah Anak	%	80	-	142,697,200	61,637,143	43.19	43.2
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Dokumen Pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Dokumen	1	-	142,697,200	61,637,143	43.19	43.2
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	-	30,000,000	26,281,792	87.61	87.61
Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	-	35,000,000	10,125,000	28.93	28.93
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak ANak bagi Lembaga OPenyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Kabupaten /Kota	Jumlah orang yang Mendapatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	25	77,697,200	25,230,351	32.47	32.47
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Prosentase anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Pelayanan Komprehensif</b>	%	<b>94</b>	-	<b>472,260,000</b>	<b>38,628,507</b>	5.23	<b>5.23</b>
<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pihak/Lembaga yang Terlibat dalam Pencegahan Kekerasan terhadap anak</b>	<b>Lembaga</b>	<b>11</b>	-	<b>193,960,000</b>	<b>24,697,031</b>	12.73	12.73
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	PD	30	-	63,800,000	16,197,031	25.39	25.39
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	-	130,160,000	8,500,000	6.53	6.53
	Jumlah Orang dalam Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	-		-		
<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Korban kekerasan terhadap anak yang terlayani	%	94	-	200,504,000	13,931,476	0.00	0.00

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			Pagu APBD (Rp)	Realisasi APBD		
		Satuan	Target	Realisasi TW II		Realisasi Keuangan		Real Fisik (%)
						RP	(%)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Koordinasi dan Sikronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Layanan	12	15	200,504,000	13,931,476	6.95	6.95
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas dari APBD	Lemba ga	2	-	<b>77,796,000</b>	-	0.00	0.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Dokum en	1	-	77,796,000	-	0.00	0.00
					6,822,416,469	3,194,416,575	0.47	

Rata-rata capaian kinerja program pada urusan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebesar 0% atau masuk kriteria Rendah.

## 2.12. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

### Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.3.560.777.371.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.350.363.401,00 atau 9,84%. Adapun realisasi selengkapannya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.15 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023 (Akhir Triwulan II)**

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			Pagu APBD (Rp)	Realisasi APBD		
		Satuan	Target	Realisasi TW II		Realisasi Keuangan		Real Fisik (%)
						RP	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Urusan PPKB								
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase masyarakat PUS yang terjangkau program Bangga Kencana melalui KIE	%	56	-	286,035,970	41,690,851	14.58	14.58
	Persentase Jumlah Kampung KB yang dibina	%	52	-				
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pendataan dan pemutakhir data keluarga	Kegiatan	1	-	286,035,970	41,690,851	14.58	14.58

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			Pagu APBD (Rp)	Realisasi APBD		
		Satuan	Target	Realisasi TW II		Realisasi Keuangan		Real Fisik (%)
						RP	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyediaan dan pengolahan data kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dokumen	1	-	118,257,350	15,592,251	13.19	13.19
Pengembangan Model solusi strategis pengendalian dampak kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model solusi strategis pengendalian dampak kependudukan	Dokumen	1	-	40,837,620	15,890,100	38.91	38.91
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	1	-	32,100,000	-	0.00	0.00
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	Dokumen	1	-	2,441,000	-	0.00	0.00
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	1	-	56,400,000	-	0.00	0.00
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	1	-	36,000,000	10,208,500	28.36	28.36
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern mCPR	%	66.75	-	1,558,341,578	255,752,550	16.32	16.32
	Kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi Unmeet need	%	20.39	-				
	Prosentase Peserta KB MKJP	%	30.03	-				
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan Advokasi dan KIE yang terlaksana dan tersedianya sarana dan prasarana KIE	Kegiatan	4	-	635,068,178	87,926,788	13.85	13.85
	Jumlah stakeholder dan mitra kerja yang mendapatkan advokasi dan KIE	Orang	372	-				
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) kepada stakeholder dan mitra kerja	Organisasi	10	-	80,000,000	-	0.00	0.00
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	1	-	13,440,000	-	0.00	0.00
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Unit	54	-	32,100,000	9,516,113	29.65	29.65
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	Dokumen	2	-	150,000,000	24,800,000	16.53	16.53



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			Pagu APBD (Rp)	Realisasi APBD		
		Satuan	Target	Realisasi TW II		Realisasi Keuangan		Real Fisik (%)
						RP	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta media luar Ruang							
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	2	-	78,000,000	-	0.00	0.00
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Tersedianya Operasional Balai Penyuluhan KB	Laporan	6	3	201,528,178	53,610,675	26.60	26.60
Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	1	-	80,000,000	-	0.00	0.00
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah laporan hasil penguatan pelaksanaan penyuluhan, Penggerakan, pelayanan dan pengembangan program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)	Kali	10	-	256,452,000	7,560,000	2.95	2.95
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Frekuensi Pelaksanaan KIE oleh Kader	Kali	10	-	30,000,000	-	0.00	0.00
Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk Petugas Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan keluarga, Kependudukan dan keluarga Berencana) untuk petugas keluarga berencana/Penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)	laporan	1	-	38,452,000	7,560,000	19.66	19.66
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Frekuensi Pelaksanaan KIE oleh Kader	Kali	10	-	188,000,000	-	0.00	0.00
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Faskes yang mendapatkan pelayanan KB dan Jumlah Faskes yang Mendapatkan Alokasi	Faskes	54	24	309,325,000	46,743,160	15.11	15.11
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	laporan	1	0	39,600,000	-	0.00	0.00
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Orang	350	42	143,695,000	38,232,160	26.61	26.61

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			Pagu APBD (Rp)	Realisasi APBD		
		Satuan	Target	Realisasi TW II		Realisasi Keuangan		Real Fisik (%)
						RP	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	laporan	1	0	62,700,000	3,300,000	5.26	5.26
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah laporan dukungan operasional pelayanan KB bergerak	laporan	5	2	63,330,000	5,211,000	8.23	8.23
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti pelaksanaan dan Pengelolaan program Bangga Kencana	Desa/Kel	19	8	357,496,400	113,522,602	30.98	30.98
Integrasi Pembangunan Lintas sektor dia Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	1	-	9,000,000	-	0.00	0.00
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung	19	8	357,496,400	113,522,602	31.75	31.75
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah Kelompok PIK R yang terbentuk	Kelompok	2	-	1,716,399,823	52,920,000	3.08	3.08
	Jumlah Poktan yang mendapatkan Pembinaan	Poktan	4	-				
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi dan Pembinaan tentang generasi berencana	Orang	30	-	1,716,399,823	52,920,000	3.08	3.08
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS)	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	unit	0	-	360,000,000	-	0.00	0.00
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelolaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Jumlah laporan hasil orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	laporan	1	-	45,999,823	-	0.00	0.00
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	94	-	1,310,400,000	52,920,000	4.04	4.04
JUMLAH TOTAL					3,560,777,371	350,363,401	9.84	

Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebesar 0% atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.

## 2.13. Urusan Pangan

### Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 336.493.029,00 dan terealisasi sebesar Rp. 78.811.429,00 atau 23,42%. Adapun realisasi anggaran urusan Pangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.16 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pangan Tahun Anggaran 2023 (Akhir Triwulan II)**

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
		Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
						RP	(%)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
Urusan Pemerintah Bidang Pangan					336,493,029	78,811,429.00	23.42	34.15
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	Ton	34167		59,628,500	-	0.00	12.94
Penyediaan infrasruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaporan Hasil Pemantauan Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian Pangan	dok	1	1	59,628,500	-	0.00	12.94
Penyediaan infrasruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Desa yang dibina untuk Pengembangan infrastruktur Lumbung Pangan Masyarakat	desa	2	2	29,712,500	-	0.00	12.27
Koordinasi dan Singkronisasi Penyediaan infrastruktur Logistik	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat dan Infrastruktur Pendukung Ketahanan Pangan di wilayah Kab.KOBAR	dok	1	1	29,916,000	-	0.00	13.61
<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>AKG (Angka Kecukupan Gizi)</b>	<b>kka/ka p/hari</b>	<b>2160</b>		<b>191,865,119</b>	<b>53,243,529.00</b>	<b>27.75</b>	<b>33.28</b>
Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah/kabupaten kota dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan	Kestabilan harga bahan pokok (25% gejolak harga)	dok	1	1	94,158,570	16,676,000.00	17.71	26.27
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah kegiatan pasar pangan murah yang dilaksanakan	dok	1	1	29,155,150	-	0.00	18.27

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
		Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
						RP	(%)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kegiatan pasar pangan murah yang dilaksanakan	dok	3	3	65,003,420	16,676,000.00	25.65	29.85
<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Pemantauan Stok Cadangan Pangan daerah</b>	<b>kali</b>	<b>6</b>		<b>24,602,500</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.29</b>
Koordinasi dan Singkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan stok Cadangan Pangan Pemerintah daerah dan Masyarakat KOBAR	k	1	1		-	0.00	0.29
<b>Pelaksanaan Pencapaian target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>Jumlah Dokumen Laporan Analisis Pola Pangan Harapan</b>	<b>dok</b>	<b>1</b>		<b>73,104,049</b>	<b>36,567,529.00</b>	<b>50.02</b>	<b>53.41</b>
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Jumlah Peserta kegiatan sosialisasi diversifikasi pangan menu B2SA	peserta	30	11	30,000,000	21,244,000.00	70.81	71.67
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok wanita Tani P2L yang dibina	kelompok	9	14	18,139,099	15,323,529.00	84.48	87.94
Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Dokumen laporan hasil pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	dok	1	1	24,964,950	-	0.00	6.39
						-	<b>0.00</b>	-
<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>Persentase penurunan kerawanan pangan (%)</b>	<b>%</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>29,999,550</b>	<b>2,496,000.00</b>	<b>8.32</b>	<b>18.88</b>
Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	Jumlah dokumen peta (FSVA) yang disusun	dok	1		14,999,700	-	0.00	8.47
Penyusunan Pemutakhiran dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dilaksanakan	Jumlah rapat Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dilaksanakan	dok	1		14,999,700	-	0.00	8.47
<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>AKG Ketersediaan</b>	<b>kap/hari</b>	<b>2493</b>	<b>2</b>	<b>14,999,850</b>	<b>2,496,000.00</b>	<b>16.64</b>	<b>29.29</b>
Koordinasi dan Singkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan Kelompok Afinitas DEMAPAN	kelompok	1	1	14,999,850	2,496,000.00	16.64	29.29
						-		-
<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>Persentase sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil (%)</b>	<b>%</b>	<b>80</b>		<b>54,999,860</b>	<b>23,071,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68.48</b>
<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan segar daerah kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah Dok/lap Hasil Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan di wilayah KOBAR</b>	<b>dok</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>54,999,860</b>	<b>23,071,900.00</b>	<b>41.95</b>	<b>68.48</b>
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dok/lap Hasil Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan di wilayah KOBAR	dok	1	3	25,000,000	14,166,500.00	56.67	64.14

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
		Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
						RP	(%)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Arsel Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel mutu keamanan pangan segar dan olahan yang diteliti	jumlah sampel	80	31	29,999,860	8,905,400.00	29.68	72.10
					<b>336,493,029</b>	<b>78,811,429.00</b>	<b>23.42</b>	<b>34.15</b>

Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Pangan adalah sebesar 12.50% atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.

## 2.14. Urusan Kelautan dan Perikanan

### Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 16.617.448.971,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.986.202.180,00 atau 36,02%. Adapun realisasi anggaran urusan Kelautan dan Perikanan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.17 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023 (Akhir Triwulan II)**

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
		Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
						RP	(%)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		%	100	8464.58	16,617,448,971	5,986,202,180	36.02	50.50
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	%	100	86	8,325,736,508	3,929,112,307	47.19	50.50
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dok	13	9	178,144,040	70,151,347	39.38	47.40
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	3	3	91,491,640	47,698,217	52.13	58.66
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dok	1	0	3,063,800	-	-	0.00



URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
		Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
						RP	(%)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dok	1	0	3,217,250	-	-	0.00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dok	1	1	3,242,000	-	-	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dok	1	0	3,060,000	-	-	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	lap	5	5	35,427,850	14,781,130	41.72	52.26
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	lap	1	2	38,641,500	7,672,000	19.85	23.34
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>dok</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>6,874,201,425</b>	<b>3,425,427,215</b>	<b>49.83</b>	<b>50.18</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	52	43	6,748,213,975	3,344,360,587	49.56	49.69
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dok	12	9	42,548,650	18,065,330	42.46	53.25
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	lap	1	2	83,143,800	63,001,298	75.77	88.96
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	umlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	lap	1	0	295,000	-	-	0.00
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>dok</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11,370,000</b>			

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
		Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
						RP	(%)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Sumber Pendanaan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dok	1	0	490,000			
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Sumber Pendanaan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dok	1	0	9,880,000			
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Pendanaan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	lap	2	0	1,000,000			
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah yang diselenggarakan</b>	<b>dok</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4,940,000</b>			
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	dok	1	0				
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan</b>	<b>dok</b>	<b>2</b>		<b>60,192,000</b>	<b>28,205,012</b>	<b>46.86</b>	<b>58.53</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	1	27	31,200,000	-	-	20.00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	orang	4	8	28,992,000	28,205,012	97.29	100.00
<b>Administrasi Umum Perangkat</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan</b>	<b>paket</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>297,171,141</b>	<b>78,935,484</b>	<b>26.56</b>	<b>48.00</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	17,738,270	9,996,970	56.36	58.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	40	84,999,761	-	-	41.18
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	3	3	15,167,990	5,545,780	36.56	50.91
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1	74,999,880	19,050,000	25.40	50.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lap	20	5	104,265,240	44,342,734	42.53	50.00
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>dok</b>	<b>1</b>		<b>89,121,279</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
		Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
						RP	(%)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang disediakan	dok	10	1	89,121,279	-	-	0.00
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	lap	2		<b>625,244,400</b>	<b>236,152,485</b>	<b>37.77</b>	<b>52.76</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	lap	12	6	245,000,000	65,640,227	26.79	50.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	lap	12	6	380,244,400	170,512,258	44.84	54.54
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	dok	5	2	<b>185,352,223</b>	<b>83,540,764</b>	<b>45.07</b>	<b>59.48</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	1	14,366,230	7,230,996	50.33	65.10
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	48	23	99,063,900	45,111,768	45.54	55.51
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	87	58	62,358,000	21,683,000	34.77	58.28
Pemeliharaan rehabilitasi/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	unit	1	3	148,107,500	148,107,500	35.77	59.28
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)</b>	Jumlah	<b>20750</b>	<b>10330</b>	<b>5,066,920,057</b>	<b>1,215,364,765</b>	<b>23.99</b>	<b>57.41</b>
<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap</b>	jenis	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2,243,419,993</b>	<b>666,367,155</b>	<b>29.70</b>	<b>62.73</b>
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	dok	1	0	111,370,300	45,754,295	41.08	47.64
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	unit	144	73	2,132,049,693	620,612,860	29.11	63.52
<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah nelayan yang mendapatkan pembinaan, pendidikan,</b>	orang	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>2,706,421,765</b>	<b>519,404,450</b>	<b>19.19</b>	<b>52.68</b>

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
		Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
						RP	(%)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pelatihann, fasilitas pembentukan dan pengembang serta sarana penangkapan ikan							
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	umlah nelayan yang mendapatkan pembinaan, pendidikan, pelatihann, fasilitas pembentukan dan pengembang serta sarana penangkapan ikan	orang	40	40	2,706,421,765	519,404,450	19.19	52.68
<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan(TPI)</b>	<b>Jumlah Pengelolaan dan penyelenggaraan TPI</b>	<b>dok</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>117,078,299</b>			
Penetapan Prosedur Pengelolaan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	dok	1	0	9,960,000			
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Pengelolaan dan penyelenggaraan TPI	lokasi	1	0	107,118,299	29,593,160	41.42	53.63
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton/tahun</b>	<b>Ton</b>	<b>11.100</b>	<b>3312</b>	<b>2,503,818,594</b>	<b>713,934,538</b>	<b>28.51</b>	<b>66.04</b>
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok pembudidaya yang mendapatkan pembinaan, pendidikan, pelatihann, fasilitas pembentukan dan pengembang serta sarana , parsarana pembudidaya ikan	kelompok	31	15	1,583,329,601	409,824,168	25.88	64.39
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	kelompok	31	13		409,824,168	25.88	64.39
<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Jumlah benih ikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>2460000</b>	<b>3284631</b>	<b>920,488,993</b>	<b>304,110,370</b>	<b>33.04</b>	<b>42.55</b>
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dok	12	9	42,830,800	10,040,130	23.44	42.55
Penyediaan prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	unit	1	0	78,682,698			
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	unit	3	373401	648,927,200	219,639,430	33.85	69.93
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui	dok	1	7	8,832,596	1,443,000	24.06	24.10

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
		Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
						RP	(%)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Kesehatan Ikan							
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	orang	25	12	50,870,342	19,285,130	37.91	45.61
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Ha	3	0	90,345,357	53,702,680	59.44	92.45
<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%)</b>	%	35	0	30,000,000	-	-	0.00
<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen pengawasan perikanan yang patuh dalam pelaksanaan usaha penangkapan</b>	dok	1	0	30,000,000	-	-	0.00
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat di usahakan dalam kabupaten/kota	dok	1	0	15,000,000	-	-	0.00
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Budidaya Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat di usahakan dalam kabupaten/kota	dok	1	0	15,000,000			
<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	Jumlah produksi perikanan yang diolah (kg/tahun)	jumlah	19.11	21120	690,973,812	92,128,490	13.33	0.00
<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	Jumlah Dokumen Laporan Statistik Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	dok	1	0	116,811,587	57,421,060	49.16	54.23
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	dok	12	10	116,811,587	57,421,060	49.16	54.23



URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
		Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
						RP	(%)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pelaku usaha/masyarakat perikanan yang mendapatkan bimbingan/pelatihan dan pendampingan usaha	unit usaha	30	4	66,330,801	18,059,600	27.23	33.33
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risikosisil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan	unit usaha	30	4	66,330,801	18,059,600	27.23	33.33
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengenalan Produk Pengolahan Hasil Perikanan	kegiatan	1	1	507,831,424	16,647,830	3.28	41.46
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	19110	207	82,703,417	-	-	0.00
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	pelaku usaha	7	7	425,128,007	16,647,830	3.92	49.53
<b>Jumlah</b>					<b>16,617,448,971</b>	<b>5,986,202,180</b>	<b>36.02</b>	<b>50.50</b>

Rata-rata capaian kinerja program pada urusan Kelautan dan Perikanan adalah sebesar 28.098% atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.

## 2.15. Urusan Lingkungan Hidup

### Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.18.824.759.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.8.392.100.539.00 atau 44,58%, sedangkan realisasi fisik sebesar 49,78%. Adapun realisasi anggaran urusan Lingkungan Hidup selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.18 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Lingkungan Hidup  
Tahun Anggaran 2023 (Akhir Triwulan II)**

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG.	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
		Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
						Rp	(%)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>URUSAN LINGKUNGAN HIDUP</b>								
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		%	90	57.31	5,494,347,185	3,148,864,569	57.31	58.70
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	27	5	60,983,500	27,993,480	45.90	90.36
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	1	52,600,000	25,098,730	47.72	99.26
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	-	1,437,500	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	-	1,437,500	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1,825,000	1,825,000	100.00	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	-	1,825,000	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	1,069,750	1,069,750	100.00	100.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	16	-	788,750	-	-	-
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>4,696,802,436</b>	<b>2,721,300,269</b>	<b>57.94</b>	<b>58.16</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bula n	33	33	4,564,555,236	2,647,458,869	58.00	58.00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	6	96,664,200	44,410,400	45.94	50.80
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	34,933,000	29,431,000	84.25	100.00

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG.	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
		Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
						Rp	(%)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	Laporan	13	-	650,000	-	-	-
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>71,633,051</b>	<b>1,972,000</b>	<b>2.75</b>	<b>2.75</b>
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	-	71,633,051	1,972,000	2.75	2.75
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah yang diselenggarakan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1,593,572</b>	<b>1,435,650</b>	<b>90.09</b>	<b>100.00</b>
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	3	3	1,593,572	1,435,650	90.09	100.00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>55,406,000</b>	<b>49,274,920</b>	<b>88.93</b>	<b>93.41</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	21,000,000	19,800,000	94.29	100.00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	-	3,650,000	-	-	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	3	3	30,756,000	29,474,920	95.83	100.00
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan</b>	<b>dokumen</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>179,395,747</b>	<b>151,121,515</b>	<b>84.24</b>	<b>92.14</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	6,003,834	5,986,230	99.71	100.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	66,040,105	66,040,105	100.00	100.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	-	7,637,378	4,584,300	60.02	60.02
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1,124,985	1,124,985	100.00	100.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	-	17,807,445	6,752,950	37.92	37.92
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	6	80,782,000	66,632,945	82.48	100.00
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>dokumen</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>13,124,995</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	-	13,124,995	-	-	-
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa</b>	<b>dokumen</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>290,890,056</b>	<b>123,556,207</b>	<b>42.48</b>	<b>50.11</b>

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG.	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
		Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
						Rp	(%)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	6	102,763,056	41,732,711	40.61	50.30
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	6	188,127,000	81,823,496	43.49	50.00
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>dokumen</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>124,517,828</b>	<b>72,210,528</b>	<b>57.99</b>	<b>58.08</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	-	40,990,000	34,880,800	85.10	85.36
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	45	19	67,327,828	28,129,728	41.78	41.78
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	24	14	16,200,000	9,200,000	56.79	56.79
<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase Penyediaan Data dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>449,965,750</b>	<b>42,480,908</b>	<b>9.44</b>	<b>10.07</b>
<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah penyediaan dokumen Implementasi RPPLH yang tersusun</b>	<b>dokumen</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>79,965,900</b>	<b>32,482,000</b>	<b>40.62</b>	<b>44.13</b>
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	2	-	79,965,900	32,482,000	40.62	44.13
<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen KLHS yang tersusun</b>	<b>dokumen</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>369,999,850</b>	<b>9,998,908</b>	<b>2.70</b>	<b>2.70</b>
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen	2	-	369,999,850	9,998,908	2.70	2.70
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Nilai Rata rata IEU SO2 dan NO2</b>	<b>Nilai rata rata</b>	<b>0.347</b>	<b>-</b>	<b>342,312,144</b>	<b>76,300,704</b>	<b>22.29</b>	<b>24.61</b>
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<b>Jumlah lokasi pemantauan yang memenuhi baku mutu</b>	<b>Lokasi</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>316,916,444</b>	<b>75,202,704</b>	<b>23.73</b>	<b>26.24</b>
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	18	5	65,728,521	26,765,000	40.72	47.68

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG.	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
		Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
						Rp	(%)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut								
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	-	9,196,300	-	-	-
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	10	3	241,991,623	48,437,704	20.02	21.41
<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah sosialisasi penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang terlaksana</b>	<b>kegiatan</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>25,395,700</b>	<b>1,098,000</b>	<b>4.32</b>	<b>4.32</b>
Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	6	-	25,395,700	1,098,000	4.32	4.32
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Terkendalinya Tutupan Hutan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>0.08</b>	<b>2,346,875,786</b>	<b>962,915,961</b>	<b>41.03</b>	<b>48.85</b>
<b>Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>Ha</b>	<b>15012.36 36</b>	<b>12.3636</b>	<b>2,346,875,786</b>	<b>962,915,961</b>	<b>41.03</b>	<b>48.85</b>
Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	24.1	-	9,999,750	-	-	-
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	12.3636	12.3636	2,157,127,600	895,003,276	41.49	50.00
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	29	12	179,748,436	67,912,685	37.78	37.78
<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>Persentase limbah B3 yang terkelola</b>	<b>%</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>19,999,538</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah limbah B3 yang terkelola</b>	<b>Kg</b>	<b>5300</b>	<b>-</b>	<b>19,999,538</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	6	-	19,999,538	-	-	-



URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG.	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
		Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
						Rp	(%)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	48.57	8.57	44,613,850	5,714,000	12.81	12.81
<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	jumlah penanggung jawab usaha/kegiatan yang taat terhadap izin usaha/izin lingkungan PPLH dan PUU LH	izin usaha	17	3	44,613,850	5,714,000	12.81	12.81
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	10	-	8,213,000	3,294,000	40.11	40.11
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	35	4	36,400,850	2,420,000	6.65	6.65
<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	Persentase Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota yang tervalidasi	%	100	-	4,012,000	-	-	-
<b>Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>	Jumlah MHA yang terverifikasi	MHA	1	-	4,012,000	-	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Dokumen	1	-	4,012,000	-	-	-
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Persentase peran serta Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi dalam peningkatan kapasitas lingkungan hidup	%	10.47	-	83,240,120	23,069,441	27.71	29.48

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG.	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
		Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
						Rp	(%)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang dilaksanakan</b>	<b>pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup</b>	17	-	83,240,120	23,069,441	27.71	29.48
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Lembaga	1	-	63,238,120	23,069,441	36.48	38.81
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	16	-	20,002,000	-	-	-
<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani</b>	%	80	-	69,325,399	17,368,100	25.05	29.00
<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang terselesaikan sesuai SOP</b>	<b>kasus</b>	5	5	69,325,399	17,368,100	25.05	29.00
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dokumen	5	5	14,390,549	430,000	2.99	8.41
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Dokumen	5	5	54,934,850	16,938,100	30.83	34.39
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani</b>	%	85.92	-	9,274,834,228	4,110,171,856	44.32	51.91
<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>Jumlah Sampah Yang ditangani</b>	<b>Ton</b>	26702.57	-	9,274,834,228	4,110,171,856	44.32	51.91
Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Laporan	2	-	55,419,630	12,299,300	22.19	27.88
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	22119	-	9,219,414,598	4,097,872,556	44.45	52.06

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG.	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
		Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
						Rp	(%)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	<b>Persentase luas TAHURA yang dikelola</b>	%	20	-	695,233,000	5,215,000	0.75	0.75
<b>Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah TAHURA yang dikelola</b>	Ha	600	-	695,233,000	5,215,000	0.75	0.75
Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Operasi	1	-	20,233,000	2,196,000	10.85	10.85
Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	1	-	675,000,000	3,019,000	0.45	0.45
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>18,824,759,000</b>	<b>8,392,100,539</b>	<b>44.58</b>	<b>49.78</b>

Memperhatikan capaian realisasi pelaksanaan program urusan lingkungan hidup tahun anggaran 2023 (Akhir Triwulan II) sebagai tersebut di atas, maka Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Lingkungan Hidup adalah sebesar 7,40% atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.

## 2.16. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 6,375,181,000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2,784,544,736,00 atau 43,68%. Adapun realisasi anggaran urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.19 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2023 (Akhir Triwulan II)**

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
		Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
						Rp	(%)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>PERSENTASE CAPAIAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH</b>	%	100	39	5,746,707,613	2,661,306,016	46.31	46.31
Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peranggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	13	7	74,629,100	48,741,961	58.61	58.61
Admnsitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	dokumen	25	13	4,364,419,316	2,254,796,089	51.66	51.66

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
		Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK
						Rp	(%)	(%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	dokumen	14	6	114,376,000	51,045,505	44.63	44.63
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan	dokumen	70	33	337,830,962	139,394,273	41.26	41.26
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang disediakan	Jenis	7	0	310,065,188	6,000,000	1.94	1.94
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	jenis	21	4	330,885,392	134,618,571	40.68	40.68
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jenis	7	2	214,501,655	31,709,617	14.78	14.78
<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase hasil pendataan pendudukan non permanen dan rentan administrasi kependudukan</b>	<b>persen</b>	<b>90</b>		<b>208,232,478</b>	<b>81,062,820</b>	<b>38.93</b>	<b>38.93</b>
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pendaftan Penduduk yang terlaksana	persen	89.8	0	16,024,150	0	0	0
Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Kependudukan yang dilaksanakan	persen	89.8	43	143,143,328	72,278,820	50.49	50.49
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	persen	89.8	0	45,010,000	8,784,000	19.52	19.52
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait pendaftaran penduduk yang dilaksanakan	persen	89.8	0	4,055,000	0	0	0
<b>Program Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil</b>	<b>persen</b>	<b>85</b>	<b>23</b>	<b>49,664,000</b>	<b>13,176,000</b>	<b>26.53</b>	<b>26.53</b>
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil	persen	91	43	49,664,000	13,176,000	26.53	26.53
<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Prosentase instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan</b>	<b>persen</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>70,369,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Instansi /lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	instansi	22	0	26,971,625	0	0	0
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Admindak yang diselenggarakan	persen	87	0	43,398,075	0	0	0

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
		Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK
						Rp	(%)	(%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rasio jumlah kependudukan yg terdata dala SIAK terhadap DAK SHEM Kemendagri	persen	87.2	0	300,207,209	28,999,900	9.66	9.66
Penyusunan Profil Kependudukan	Rasio jumlah kependudukan yg terdata dala SIAK terhadap DAK SHEM Kemendagri	persen	87.2	0	330,935,474	57,190,584	17.28	0
<b>TOTAL</b>					<b>6,375,181,000</b>	<b>2,784,544,736</b>	<b>43.68</b>	<b>43.68</b>

Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Urusan Kependudukan dan Pencatatan adalah sebesar 11,01% atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.

## 2.17. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

### Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.358.267.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.318.315.773,00 atau 35,46%. Adapun realisasi anggaran urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.20 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2023 (Akhir Triwulan II)**

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Nama Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya urusan penunjang pada perangkat daerah	%	100		5.119.801.947	2.446.363.763	47,78	49,35
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran kinerja perangkat daerah	dok	7		44.211.100	24.865.480	56,24	44,93
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	umlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	2	1	35.221.500	24.865.480	70,60	56,40
2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	umlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dok	1	0	1.499.700	-	-	-



Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Nama Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	umlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dok	1	0	1.500.250	-	-	-
2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	umlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dok	1	0	499.700	-	-	-
2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	umlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dok	1	0	499.700	-	-	-
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	lap	4	0	2.990.450	-	-	-
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	lap	4	0	1.999.800	-	-	-
<b>2.13.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>dok</b>	<b>15</b>		<b>4.251.270.828</b>	<b>2.342.593.677</b>	<b>55,10</b>	<b>56,05</b>
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	31	31	4.209.411.028	2.342.593.677	55,65	55,64
2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dok	2	2	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	lap	1	2	40.360.000	40.031.330	99,19	99,19
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	lap	12	0	499.800	-	-	-

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Nama Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	dok	4	0	502.600	-	-	-
2.13.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dok	2	0	199.850	-	-	-
2.13.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	lap	2	0	103.250	-	-	-
2.13.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	lap	2	0	99.750	-	-	-
2.13.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	dok	2	0	99.750	-	-	-
2.13.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	pake	31	0	18.600.000	-	-	87,10
2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	pake	31	0	18.600.000	-	-	87,10
2.13.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Pemenuhan pelayanan administrasi umum pada perangkat daerah</b>	paket	29	0	129.238.192	-	-	-
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	4	5.400.150	5.400.100	100,00	100,00
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	16	7	39.846.315	26.537.255	66,60	66,60
2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	8	8	5.794.577	5.794.516	100,00	100,00
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1	8.162.350	5.499.550	67,38	67,38
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lap	25	19	70.034.800	53.416.171	76,27	81,69
2.13.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	unit	5	0	411.048.845	-	-	-

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Nama Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	0	376.086.354	-	-	-
2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	1	0	12.499.999	-	-	-
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	3	3	22.462.492	-	-	100,00
<b>2.13.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>terpenuhinya jasa penunjang pada perangkat daerah</b>	<b>laporan</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>192.214.832</b>	<b>76.464.606</b>	<b>39,78</b>	<b>38,51</b>
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	6	61.992.432	22.284.264	35,95	36,19
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	6	130.222.400	54.180.342	41,61	39,62
<b>2.13.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpenuhinya pemeliharaan barang daerah pada perangkat daerah</b>	<b>unit</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>72.715.550</b>	<b>2.440.000</b>	<b>3,36</b>	<b>15,53</b>
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	4	0	17.864.800	-	-	49,54
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	26	0	17.860.000	2.440.000	13,66	13,66
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	0	36.990.750	-	-	-
<b>02:13:02</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>Persentase Penataan Pemerintahan Desa</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>39.997.800</b>	<b>11.421.740</b>	<b>28,56</b>	<b>28,56</b>
<b>2.13.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>Jumlah desa yang telah dilakukan penataan</b>	<b>desa</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>39.997.800</b>	<b>11.421.740</b>	<b>28,56</b>	<b>28,56</b>
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	desa	1	0	14.999.700	-	-	-
2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	desa	1	0	14.998.500	7.596.740	50,65	50,65
2.13.02.2.01.04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	desa	1	0	9.999.600	3.825.000	38,25	38,25

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Nama Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02:13:03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	Persentase terpenuhinya Urusan Penunjang pada perangkat daerah	%	100	38	59.999.500	32.314.000	53,86	61,79
2.13.03.2.01	<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>	Jumlah desa yang terfasilitasi kerjasama BUMDES dan BUMDESMA	dok	10	2	59.999.500	32.314.000	53,86	61,79
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	dok	1	1	9.999.800	4.992.000	49,92	97,50
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	dok	1	0	9.999.700	-	-	-
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	dok	8	4	40.000.000	27.322.000	68,31	68,31
2.13.04	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Pemerintahan Desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel / baik</b>	%	100		3.028.227.433	466.838.998	15,42	15,55
2.13.04.2.01	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>desa yang telah dilakukan pembinaan dan telah mendapatkan pengawasan</b>	dok	8		3.028.227.433	466.838.998	15,42	15,55
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	dok	81	39	29.412.300	18.830.300	64,02	64,02
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	dok	162	53	835.603.700	416.013.738	49,79	49,79
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	dok	6	3	24.999.960	16.616.960	66,47	66,47
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	dok	36	0	1.900.000.223	6.500.000	0,34	3,56
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	dok	3	1	7.499.750	-	-	44,64
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah dokumen profil Desa	dok	6	0	-	-	-	-
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	dok	7	0	200.711.500	-	-	-
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi	Jumlah Dokumen	dok	1	1	20.000.000	15.378.000	76,89	96,95

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Nama Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan							
02:13:05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang telah dibina	%	100	0,45	1.110.241.020	214.448.350	19,32	29,44
2.13.05.2.01	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang telah diberdayakan	dok	8	0	1.110.241.020	214.448.350	19,32	29,44
2.13.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	dok	1	0	10.000.000	2.750.000	27,50	27,50
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	dok	2	0	4.999.650	-	-	-
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga	3	1	26.999.750	11.580.000	42,89	42,89
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	laporan	1	0	-	-	-	-
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	laporan	1	0	48.261.500	-	-	-



Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Nama Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	dok	5	0	1.009.999.470	196.938.350	19,50	30,63
<b>JUMLAH</b>						<b>9.358.267.700</b>	<b>3.318.315.773</b>	<b>35,46</b>	<b>37,90</b>

Rata-rata capaian kinerja program pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebesar 0% atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.

## 2.18. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

### Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.255.769.968,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.458.772.833,00 atau 41,9 %, Adapun realisasi anggaran urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.21 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2023 (Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi s/d TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	4	5	6	7	3	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					8,255,769,968.00	3,458,772,833.00	41.90	46.02
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	%	100	64.29	7,584,265,834.00	3,448,284,833.00	45.47	49.75
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dok	14	9	113,954,100.00	49,074,114.00	43.06	64.49
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	3	2	81,787,000.00	49,074,114	60.00	80.00

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi s/d TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	4	5	6	7	3	8	9	10
	Perangkat Daerah								
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dok	1	1	3,109,600.00	0	0.00	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dok	1	1	3,109,600.00	0	0.00	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dok	1		3,109,600.00	0	0.00	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dok	1		3,109,600.00	0	0.00	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	lap	3	3	3,601,600.00	0	0.00	0.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	lap	4	2	16,127,100.00	0	0.00	50.00
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	dok	3	<b>2</b>	<b>5,780,269,945.00</b>	<b>2,923,961,349.00</b>	<b>50.59</b>	<b>50.33</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang / bulan	624	312	5,680,527,645.00	2,889,776,699	50.87	50.87
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dok	200	110	43,508,250.00	5,500,000	12.64	45.30
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	lap	1	1	56,234,050.00	28,684,650	51.01	89.77
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	dok	1		<b>215,364,300.00</b>	<b>5,905,040</b>	<b>2.74</b>	<b>25.90</b>
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dok	1		215,364,300.00	5,905,040	2.74	25.90
<b>4</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	dok	200		<b>92,246,218.00</b>	-	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	dok	200		92,246,218.00	0	0.00	0.00
<b>5</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang	Dokum en	1		<b>151,655,000.00</b>	<b>36,884,991</b>	<b>24.32</b>	<b>40.92</b>

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi s/d TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	4	5	6	7	3	8	9	10
		disediakan							
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	stell	149	52	82,700,000.00	0	0.00	0.00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	5	4	68,955,000.00	36,884,991	53.49	90.00
<b>6</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	paket	5	4	<b>354,726,877.00</b>	<b>92,134,155</b>	<b>26.54</b>	<b>57.64</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1		13,101,752.00	0	0.00	0.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	jenis	47	47	92,891,811.00	0	0.00	35.90
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	unit	192	39	22,765,857.00	0	0.00	8.98
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	jenis	4	4	75,488,457.00	0	0.00	45.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ok	20	20	150,479,000.00	92,134,155	61.23	90.23
<b>7</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	jumlah unit Barang Milik Daerah yang diadakan	unit	2	2	<b>101,049,949.00</b>	<b>100,855,375</b>	<b>99.81</b>	<b>100.00</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	11	11	78,874,968.00	78,697,000	99.77	100.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	4	4	22,174,981.00	22,158,375	99.93	100.00
<b>8</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	paket	3	3	<b>642,705,225.00</b>	<b>227,384,859</b>	<b>35.38</b>	<b>46.81</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	paket	57	27	1,995,000.00	0	0.00	32.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	12	6	342,238,425.00	112,702,717	32.93	54.22
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	bulan	12	6	298,471,800.00	114,682,142	38.42	38.42
<b>9</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang dipelihara	unit	5	4	<b>132,294,220.00</b>	<b>12,084,950</b>	<b>9.13</b>	<b>50.08</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	1	1	34,997,570.00	12,084,950	34.53	73.00

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi s/d TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	4	5	6	7	3	8	9	10
	Jabatan								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	14	13	39,819,000.00	0	0.00	48.22
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	80	32	50,040,000.00	0	0.00	37.80
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	13	9	7,437,650.00	0	0.00	34.77
II	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	%	20	13.5	18,000,200.00	10,488,000	58.27	93.60
10	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan	unit usaha	40	24	18,000,200.00	10,488,000	58.27	93.60
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	unit usaha	40	38	18,000,200.00	10,488,000	58.27	93.60
III	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	%	30	18.6	17,998,640.00	3,090,000	17.17	64.88
11	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Laporan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam	unit usaha	25	16	17,998,640.00	3,090,000	17.17	64.88
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	unit usaha	25	16	17,998,640.00	3,090,000	17.17	64.88
IV	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	%	30	20	318,370,000.00	106,933,080	33.59	90.23
12	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang</b>	Jumlah Sertifikat Pelatihan Koperasi yang di terbitkan	orang	60	60	171,563,614.00	106,933,080	62.33	90.23

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi s/d TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	4	5	6	7	3	8	9	10
	<b>Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>								
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	orang	60	60	171,563,614.00	106,933,080	62.33	90.23
13	<b>Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Sertifikat Pelatihan Usaha Mikro yang di terbitkan	orang	56	56	<b>146,806,386.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>53.00</b>
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan tentang UKM	orang	56	56	146,806,386.00	0	0.00	53.00
V	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	Persentase Peningkatan volume Usaha Koperasi	%	8		<b>24,999,570.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
14	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Laporan Pendampingan Peningkatan Usaha Koperasi	unit usaha	7	7	<b>24,999,570.00</b>	0	0.00	0.00
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	unit usaha	7	7	24,999,570.00	0	0.00	0.00
VI	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIK</b>	Persentase jumlah usaha mikro Potensial yang bermitra	%	17.8		<b>106,270,200.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>8.50</b>
15	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	Jumlah Laporan Pendampingan Kepada Pelaku Usaha Mikro	dok	30	22	<b>106,270,200.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>8.50</b>
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	dok	30	30	9,999,900.00	0	0.00	90.30
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	unit usaha	30		15,000,000.00	0	0.00	0.00



No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi s/d TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	4	5	6	7	3	8	9	10
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	unit usaha	60	34	16,270,250.00	0	0.00	0.00
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	orang	60		65,000,050.00	0	0.00	0.00
VII	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitasi kemudahan berusaha	%	1		<b>185,865,524.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
16	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	Jumlah Laporan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	unit usaha	2		<b>185,865,524.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	unit usaha	2		185,865,524.00	0	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>						<b>8,255,769,968.00</b>	<b>3,458,772,833.00</b>	<b>41.90</b>	<b>46.02</b>

Rata-rata capaian kinerja program pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebesar 37,21 % atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.

## 2.19. Urusan Perindustrian

### Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 744.109.582,00 dan terealisasi sebesar Rp.257.786.000,00 atau 34.64%. Adapun realisasi anggaran Urusan Perindustrian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.22 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Perindustrian Tahun Anggaran 2023 (Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi s/d TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	4	5	6	7	3	8	9	10
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>								
XIV	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM	%	5.38		<b>667,697,582.00</b>	<b>250,000,000</b>	<b>37.44</b>	<b>46.02</b>

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi s/d TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	4	5	6	7	3	8	9	10
27	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	Jumlah IKM yang terfasilitasi	dok	53		<b>667,697,582.00</b>	<b>250,000,000</b>	<b>37.44</b>	<b>46.02</b>
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	dok	30		57,663,476.00	0	0.00	0.00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	dok	20	7	534,495,000.00	250,000,000	46.77	53.00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	dok	3		75,539,106.00	0	0.00	31.79
XV	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan (yg di awasai data terakhir / kumulatif)	%	27.78		<b>33,417,500.00</b>	<b>2,196,000</b>	<b>6.57</b>	<b>12.75</b>
28	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan dan Perizinan IUI IPUI IPKI yang diawasi	dok	85	27	<b>33,417,500.00</b>	<b>2,196,000.00</b>	<b>6.57</b>	<b>12.75</b>
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	dok	10	6	12,417,500.00	2,196,000	17.68	34.30
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di	dok	75	34	21,000,000.00	0	0.00	0.00

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi s/d TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	4	5	6	7	3	8	9	10
	IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota							
XVI	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	Nilai Kualitas Informasi Industri	%	50		<b>42,994,500.00</b>	<b>5,590,000.00</b>	<b>13.00</b>	<b>15.10</b>
29	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Informasi Industri yang di publikasi	dok	23	16	<b>42,994,500.00</b>	<b>5,590,000.00</b>	13.00	15.10
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Informasi Industri yang di publikasi Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	dok	2	1	17,995,000.00	4,492,000	24.96	29.90
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	dok	21	15	24,999,500.00	1,098,000	4.39	4.45
<b>TOTAL</b>						<b>744,109,582.00</b>	<b>257,786,000</b>	<b>34.64</b>	<b>42.74</b>

Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Perindustrian adalah sebesar 0% atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.

## 2.20. Urusan Perdagangan

### Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.4.708.908.450,00, dan terealisasi sebesar Rp.1.489.840.057,00 atau 31,64%. Adapun realisasi anggaran Urusan Perdagangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.23 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Perdagangan Tahun Anggaran 2023 (Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>								
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>					<b>4.708.908.450,00</b>	<b>1.489.840.057,00</b>	<b>31,64</b>	61,97
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	Persentase pelaku usaha yang izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/Smemper oleh IUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	%	25,71		<b>18.360.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65,66</b>
17	<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>	Jumlah Laporan Pengawasan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	toko moder	20	13	<b>9.790.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65,66</b>
	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah toko swalayan yg sesuai dengan perizinannya	toko moder	20	13	9.790.000,00	0	0,00	65,66
18	<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	Jumlah Laporan Pengawasan Tanda Daftar Gudang	dok	1		<b>8.570.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Facilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	dok	1		8.570.000,00	0	0,00	0,00
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	%	50		<b>3.289.342.450,00</b>	<b>1.162.795.307</b>	<b>35,35</b>	<b>65,24</b>
19	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	Jumlah Laporan Hasil Pembangunan dan Pengelolaan Distribusi Perdagangan	unit	170	34	<b>338.535.850,00</b>	45.439.403	<b>13,42</b>	<b>64,55</b>
	Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	unit	170	34	338.535.850,00	45.439.403	13,42	64,55
20	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	Jumlah Laporan Analisa Peningkatan Pengelolaan Pasar Rakyat	dok	2		<b>2.950.806.600,00</b>	<b>1.117.355.904</b>	<b>37,87</b>	<b>65,32</b>

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dok	2		2.925.862.600,00	1.117.355.904	38,19	65,88
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dok	2		24.944.000,00	0	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	<b>5,5</b>		<b>609.955.000,00</b>	<b>3.300.000</b>	<b>0,54</b>	<b>97,08</b>
21	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Analisa Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di daerah	lap	4	2	9.020.000,00	3.300.000	36,59	36,59
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	lap	4	2	9.020.000,00	3.300.000	36,59	36,59
22	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah terbitan Perkembangan Harga Komoditas yang di publikasi	lap	12	6	590.615.000,00	0	0,00	98,77
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	lap	12	6	20.000.000,00	0	0,00	63,77
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Sembako yang terdistribusi	Paket	5000	5000	570.615.000,00	0	0,00	100,00
23	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Realisasi Kinerja Pupuk dan Pestisida yang tersalurkan	lap	12	6	10.320.000,00	0	0,00	53,22
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	lap	12	6	10.320.000,00	0	0,00	53,22
<b>XI</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	Nilai Eksport (US\$ juta)	nilai	564,241		<b>664.568.000,00</b>	<b>309.494.750,00</b>	<b>46,57</b>	<b>50,52</b>
24	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan Pelaku Usaha Potensial Ekspor	pelaku usaha	21	11	664.568.000,00	309.494.750,00	46,57	50,52



No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	pelaku usaha	5		10.690.000,00	0	0,00	21,59
	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	pelaku usaha	3	3	643.020.000,00	309.494.750	48,13	51,85
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	pelaku usaha	13	13	10.858.000,00	0	0,00	0,00
XII	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	81		<b>115.033.000,00</b>	<b>14.250.000</b>	<b>23,34</b>	<b>27,29</b>
25	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	Jumlah Dokumen Laporan Tera /Tera Ulang Dan Pengawasan BDKT	unit	1630	832	<b>115.033.000,00</b>	<b>14.250.000,00</b>	23,34	27,29
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	unit	1630	832	105.033.000,00	14.250.000	27,91	26,79
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	orang	149	63	10.000.000,00	0	0,00	32,50
XIII	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	Persentase peningkatan omset UMKM yang bermitra	%	12		<b>11.650.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	Jumlah Laporan Pembinaan UMKM yang bermitra	umkm	5		<b>11.650.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	umkm	5		11.650.000,00	0	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>						<b>4,708,908,450.00</b>	<b>1,489,840,057.00</b>	<b>31.64</b>	<b>61.97</b>

Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Perdagangan adalah sebesar 0 % atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.

## 2.21. Urusan Perhubungan

### Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.10.474.151.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.853.500.525,00 atau 36.79%, sedangkan realisasi fisik sebesar 38.39% Adapun realisasi anggaran Urusan Perhubungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.24 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Urusan Perhubungan  
Tahun Anggaran 2023 (Akhir Triwulan II)**

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (RP)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							RP	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten</b>	<b>Persentase ketercukupan administrasi perkantoran</b>	%	100	50	5.546.127.914	3.077.013.577	55,48%	58,50%
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Nilai skor	80	42	113.697.000	54.289.524	47,75%	47,75%
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	2	100.492.000	46.774.524	46,55%	46,55%
2	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	2.400.000	2.400.000	100%	100%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	2.400.000	-	-	-
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	2.695.000	2.695.000	100%	100%
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	2.000.000	-	-	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	0	1.290.000	-	-	-
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	2.420.000	2.420.000	100%	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	%	90	45	4.644.081.801	2.668.232.230	57,45%	61,07%
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bln	36	36	4.306.902.801	2.495.825.250	57,95%	61,84%
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	272.949.000	118.013.660	43,24%	43,24%

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (RP)	REAISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							RP	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	62.905.000	54.393.320	86,47%	86,47%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapo Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se me SKPD	Laporan	1		1.325.000	-	-	-
2	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Barang milik daerah	Dokumen	4	0	9.328.500	-	-	-
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	0	498.500	-	-	-
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	0	7.830.000	-	-	-
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	2	0	1.000.000	-	-	-
2	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang akuntabel	%	90	0	17.810.505	6.565.375	36,86%	36,86%
2	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	1	0	17.810.505	6.565.375	36,86%	36,86%
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Disiplin Aparatur	%	90	75	11.580.000	9.102.032	78,60%	78,60%
2	Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	OK	3	3	11.580.000	9.102.032	78,60%	78,60%
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	%	90	65	184.071.829	143.341.259	77,87%	77,87%
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	18	18	10.463.605	10.463.598	100%	100%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	20	46.596.513	45.853.197	98,40%	98,40%
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis	1	0	237.840	-	-	-
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1		25.219.871	18.840.203	74,70%	74,70%
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	55	40	101.554.000	68.184.261	67,14%	67,14%

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (RP)	REAISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							RP	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	90	90	16.374.997	16.350.300	99,85%	99,85%
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	26	26	16.374.997	16.350.300	99,85%	99,85%
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	90	38	260.825.822	92.603.935	35,50%	35,50%
2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	0	245.000	-	-	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	6	167.466.672	51.244.188	30,60%	30,60%
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	6	93.114.150	41.359.747	44,42%	44,42%
2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	%	90	28	288.357.460	86.528.922	32,23%	26,61%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	0	34.709.580	5.900.000	17,00%	17,00%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	5	174.093.580	55.785.522	32,04%	32,04%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	70	30	50.859.300	24.843.400	48,85%	48,85%
2	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	0	19.860.000	-	-	-
2	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	0	8.835.000	-	-	-
2	<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>	<b>Rasio konektivitas transportasi angkutan Jalan</b>	<b>Rasio</b>	<b>0,81</b>		<b>3.190.929.033</b>	<b>399.544.759</b>	<b>12,52%</b>	<b>12,52%</b>
2	Penetapan Rencana Induk	Dokumen Penetapan Rencana Induk jaringan LLAJ kabupaten/kota yang berkualitas	%	90	0	503.527.500	-	-	-
2	Pelaksanaan Penyusunan Rencana	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana	Dokumen	1	0	503.527.500	-	-	-

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (RP)	REAISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							RP	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota							
2	Peyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Persentase perlengkapan jalan yang dibangun	%	80	0	1.681.397.647	69.850.000	4,15%	4,15%
2	Pembangunan Prasarana Jalan di jalan Kab / Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	20	0	599.657.524	37.945.700	6,33%	6,33%
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	25	0	699.020.000	-	-	-
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	575	0	382.720.123	31.904.300	8,34%	8,34%
2	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Dokumen ijin Penyelenggaraan parkir yang diterbitkan berkualitas	Dokumen	1	0	134.625.000	3.825.000	2,84%	2,84%
2	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota dalam sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	0	47.166.000	3.125.000	6,63%	6,63%
2	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab./Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan ijin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	2	0	87.459.000	700.000	0,80%	0,80%
2	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kab / Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	%	0,31	0	616.565.200	242.806.100	39,38%	39,38%
2	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kab / Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	2	0	359.690.000	155.176.300	43,14%	43,14%
2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Unit	65	0	75.500.000	3.000.000	3,97%	3,97%
2	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan manajemen dan rekayasa Lalu lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	157.165.200	62.293.600	39,64%	39,64%



KODE REKENING	URAIAN PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (RP)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							RP	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	2	2	21.460.000	20.961.200	97,68%	97,68%
2	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	2	1	2.750.000	1.375.000	50%	50%
2	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelanggaran lalu lintas angkutan jalan	%	60	0	5.594.500	-	-	-
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit, dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	2	0	1.250.000	-	-	-
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	2	0	1.499.500	-	-	-
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	1.445.000	-	-	-
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	0	1.400.000	-	-	-
2	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan angkutan darat	%	6	3	245.459.186	83.063.659	33,84%	33,84%
2	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	2	1	191.114.186	54.899.700	28,73%	28,73%
2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	6	2	54.345.000	28.163.959	51,82%	51,82%

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (RP)	REAISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							RP	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana umum jaringan Trayek perkotaan yang berkualitas	%	90		600.000	-	-	-
2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	600.000	-	-	-
2	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ijin trayek yang diterbitkan	%	10	0	690.000	-	-	-
2	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	4	0	690.000	-	-	-
2	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan	%	90	0	2.470.000	-	-	-
2	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	1.370.000	-	-	-
2	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	2	0	1.100.000	-	-	-
2	<b>Program Pengelolaan Pelayaran</b>	<b>Rasio Konektivitas sungai dan danau</b>	<b>Rasio</b>	<b>0,47</b>		<b>788.574.967</b>	<b>4.450.000</b>	<b>0,56%</b>	<b>0,56%</b>
2	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase fasilitas pengelolaan pelayaran dalam kondisi baik	%	90	0	788.574.967	4.450.000	0,56%	0,56%
2	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	3	0	788.574.967	4.450.000	0,56%	0,56%

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (RP)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							RP	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase ketercukupan administrasi perkantoran</b>	%	75		325.248.362	118.089.000	36,31%	36,31%
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	%	90	50	9.360.090	5.491.221	58,67%	58,67%
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	11	5	5.714.360	2.850.000	49,87%	49,87%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1.807.890	1.641.221	90,78%	90,78%
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	237.840	-	-	-
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1.000.000	1.000.000	100%	100%
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	0	600.000	-	-	-
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	90	45	262.191.272	111.397.785	42,49%	42,49%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	6	62.211.272	24.645.385	39,62%	39,62%
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	6	199.980.000	86.752.400	43,38%	43,38%
2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	%	90	0	53.697.000	1.200.000	2,23%	2,23%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	0	41.297.000	1.200.000	2,91%	2,91%
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	0	12.400.000	-	-	-
2	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase ketercukupan administrasi perkantoran</b>	%	100		220.997.214	82.925.644	37,52%	37,52%

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (RP)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							RP	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	%	90	45	7.932.680	1.499.800	18,91%	42,37%
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	11	0	4.366.500	-	-	-
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	0	2.066.380	-	-	-
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1.499.800	1.499.800	100%	100%
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	90	50	209.344.534	78.925.844	37,70%	37,70%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	6	42.581.924	9.688.344	22,75%	22,75%
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	6	166.762.610	69.237.500	41,52%	41,52%
2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	%	90	65	3.720.000	2.500.000	67,20%	67,20%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	4	3.720.000	2.500.000	67,20%	67,20%
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase ketercukupan administrasi perkantoran</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>193.252.510</b>	<b>94.977.539</b>	<b>49,15%</b>	<b>38,38%</b>
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	%	90	80	16.702.310	8.151.595	48,81%	48,81%
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	2.161.160	2.145.000	99,25%	99,25%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	4.507.350	4.506.795	99,99%	99,99%
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1.499.800	1.499.800	100%	100%
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	0	8.534.000	-	-	-
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	90	50	167.215.400	77.545.944	46,37%	46,37%

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (RP)	REAISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							RP	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	6	43.586.400	23.183.044	53,19%	53,19%
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	6	123.629.000	54.362.900	43,97%	43,97%
2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	%	90	80	9.334.800	9.280.000	99,41%	71,02%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0 2	2	9.334.800	9.280.000	99,41%	71,02%
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Rasio konektivitas transportasi angkutan Jalan</b>	<b>Rasio</b>	<b>0,81</b>		<b>209.021.000</b>	<b>76.500.000</b>	<b>36,60%</b>	<b>36,60%</b>
2	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sektor transportasi	%	80	33	209.021.000	76.500.000	36,60%	36,60%
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	1	0	8.449.000,00	-	-	-
2	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	3700	3700	76.500.000	76.500.000	100%	100%
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	13	0	104.000.000	-	-	-
2	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	2	0	17.382.000	-	-	-
2	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	2	0	2.690.000	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>					<b>10.474.151.000</b>	<b>3.853.500.525</b>	<b>36,79%</b>	<b>38,39%</b>

Rata-rata capaian kinerja program pada urusan Perhubungan adalah sebesar 8,33% atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.



## 2.22. Urusan Penanaman Modal

### Realisasi Pelaksanaan Program

Usuran Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.647.198.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.135.906.547,00 atau 47,18%, sedangkan realisasi fisik sebesar 57,09% Adapun realisasi anggaran urusan Penanaman Modal selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.25 Realisasi Pelaksanaan Program Penanaman Modal Tahun Anggaran 2023 (Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp.	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>50,88</b>	<b>5.630.820.146</b>	<b>2.912.049.770</b>	<b>51,72</b>	<b>60,14</b>
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>117.409.800</b>	<b>53.554.270,00</b>	<b>45,61</b>	<b>73,28</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	70.632.000	37.181.420	52,64	94,99
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	0	2.497.250	-	-	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	0	2.505.500	-	-	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2	2.497.250	2.497.250	100,00	92,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	0	1.752.500	-	-	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Laporan	13	5	35.023.700	13.875.600	39,62	47,54
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	0	2.501.600	-	-	
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4.529.815.413</b>	<b>2.586.363.631</b>	<b>57,10</b>	<b>66,54</b>
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	33	33	4.469.362.163	2.543.962.006	56,92	66,30
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	3500	1735	5.500.000	2.000.000	36,36	45,45

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp.	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	53.455.000	40.401.625	75,58	95,30
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapo Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	Laporan	25	0	1.498.250	-	-	15,38
<b>III</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Layanan Administrasi Kepegawaian yang Disediakan</b>	<b>Paket</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>73.316.000</b>	<b>39.796.080</b>	<b>54,28</b>	<b>81,56</b>
12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	36	36	19.800.000	19.800.000	100,00	100,00
13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	2	53.516.000	19.996.080	37,36	60,00
<b>IV</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Administrasi Umum yang Disediakan</b>	<b>Paket</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>231.219.127</b>	<b>99.354.144</b>	<b>42,97</b>	<b>11,83</b>
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	4	7.929.596	4.588.024	57,86	57,86
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	28	0	57.927.193	-	-	-
16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	14	0	7.129.766	-	-	-
17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	0	48.784.426	9.180.000	18,82	18,82
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	8	0	109.448.146	85.586.120	78,20	25,00
<b>V</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang Disediakan</b>	<b>Unit</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>94.505.677</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	35	0	94.505.677	-	-	-
<b>VI</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan</b>	<b>Laporan</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>307.156.378</b>	<b>109.588.689</b>	<b>35,68</b>	<b>37,80</b>
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6	350.000	-	-	-
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	6	133.860.378	37.448.217	27,98	32,84

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp.	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	6	172.946.000	72.140.472	41,71	41,71
<b>VII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan</b>	<b>Unit</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>277.397.751</b>	<b>23.392.956</b>	<b>8,43</b>	<b>1,17</b>
23	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	2	44.072.751	6.752.956	15,32	7,37
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	62	31	34.450.000	16.640.000	48,30	48,30
25	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	198.875.000	-	-	-
	<b>2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>								
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Minat Investasi</b>	<b>%</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>156.834.204</b>	<b>34.593.172</b>	<b>22,06</b>	<b>29,27</b>
<b>VIII</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum</b>	<b>Dokumen</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>116.834.204</b>	<b>29.553.172</b>	<b>25,29</b>	<b>30,74</b>
26	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	2	0	116.834.204	29.553.172	25,29	30,74
<b>IX</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Peta Investasi dan Peluang Investasi</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>5.040.000</b>	<b>12,60</b>	<b>25,00</b>
27	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	40.000.000	-	-	-
<b>C</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan</b>	<b>%</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>235.199.750</b>	<b>14.269.020</b>	<b>6,07</b>	<b>36,76</b>
<b>X</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>235.199.750</b>	<b>14.269.020</b>	<b>6,07</b>	<b>6,07</b>

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp.	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	235.199.750	14.269.020	6,07	6,07
<b>D</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Perizinan yang Diterbitkan</b>	<b>%</b>	<b>98</b>	<b>45,25</b>	<b>132.147.100</b>	<b>34.780.600</b>	<b>26,32</b>	<b>46,40</b>
XI	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin dan Non Izin, Pemantauan Pemenuhan Komitmen dan Pengelolaan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Melalui Sistem Elektronik dan Non Elektronik yang dapat diselesaikan	Pelaku Usaha	500	225	132.147.100	34.780.600	26,32	46,40
29	Penyediaan Pelayanan Teadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	500	225	49.886.600	14.170.600	28,41	31,41
30	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	500	225	73.871.000	20.610.000	27,90	59,77
31	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Teadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	500	0	8.389.500	-	-	-
<b>E</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Perusahaan yang Melaporkan Tepat Waktu</b>	<b>%</b>	<b>71</b>	<b>23,1</b>	<b>450.500.000</b>	<b>123.703.635</b>	<b>27,46</b>	<b>43,59</b>
XII	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	200	186	450.500.000	123.703.635	27,46	43,59
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	200	0	-	-	-	-
33	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	230	99	372.955.000	113.962.635	30,56	43,27
34	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Kegiatan Usaha	200	87	77.545.000	9.741.000	12,56	45,14

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp.	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penanaman Modal	Pengawasan							
F	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data yang Terintegrasi pada Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dikelola	%	60	29,25	41.696.800	16.510.350	39,60	35,51
XIII	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Terintegrasi	Laporan	1	1	41.696.800	16.510.350	39,60	35,51
35	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Laporan	4	1	41.696.800	16.510.350	39,60	35,51
	<b>TOTAL</b>					<b>6.647.198.000</b>	<b>3.135.906.547</b>	<b>47,18</b>	<b>57,09</b>

Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Penanaman Modal adalah sebesar 29,72% atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.

## 2.23. Urusan Komunikasi dan Informatika

### Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp 9.334.531.820,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.793.561.883 atau 40.64 %. Adapun realisasi anggaran Urusan Komunikasi dan Informatika selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.26 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Komunikasi, Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Tahun Anggaran 2023 (Akhir Triwulan II)**

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / BELANJA	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APABD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL ISASI FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	50	5,862,456,436	3,053,731,983	52.09	56.79
	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	2	2	40,266,000	19,607,487	48.69	99.04



NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / BELANJA	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APABD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	1	40,266,000	19,607,487	48.69	99.04
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>dokumen</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>5,062,313,885</b>	<b>2,728,744,927</b>	<b>53.90</b>	<b>59.17</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	39	39	5,022,380,885	2,695,095,482	53.66	58.95
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	12	5,000,000	5,000,000	100	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	34,933,000	28,649,445	82.01	100.
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>orang</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>71,240,000</b>	<b>34,660,007</b>	<b>48.65</b>	<b>54.33</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	stell	50	0	23,400,000	0	0.00	0.00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	5	5	47,840,000	34,660,007	72.45	80.90
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>paket</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>129,273,685</b>	<b>63,065,249</b>	<b>48.78</b>	<b>52.93</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	6,223,448	6,204,000	99.69	100.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	20,765,700	9,515,886	45.83	46.40
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	1	6,292,937	5,637,330	89.58	100.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1	18,577,600	4,445,000	23.93	32.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	15	7	77,414,000	37,263,033	48.13	52.10
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>unit</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>201,591,862</b>	<b>82,401,000</b>	<b>40.88</b>	<b>19.80</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	1	1	201,591,862	82,401,000	40.88	19.80
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>laporan</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>281,690,704</b>	<b>120,948,313</b>	<b>42.94</b>	<b>49.32</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	6	77,748,504	29,514,713	37.96	48.09
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	6	203,942,200	91,433,600	44.83	49.79
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>unit</b>	<b>38</b>	<b>2</b>	<b>76,080,300</b>	<b>4,305,000</b>	<b>5.66</b>	<b>10.07</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	unit	1	0	14,791,800	0	0.00	0.00